

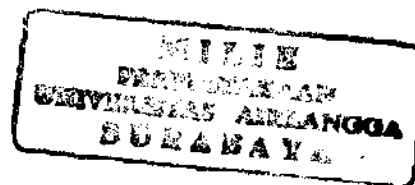
Bank Credit

TE 23/05

San
a.

TESIS

ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO



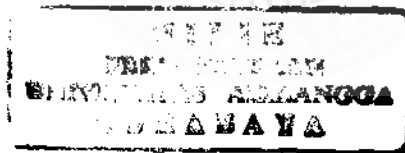
UNTUNG SANTOSO

PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

SURABAYA
2003

TESIS

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN
KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
PADA ERA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO**



UNTUNG SANTOSO

**PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**SURABAYA
2003**

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN
KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
PADA ERA OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Manajemen
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Oleh :

UNTUNG SANTOSO
NIM 099910118. L

**PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
SURABAYA**

Tanggal 21 April 2003

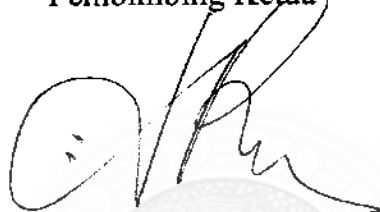
Lembar pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 7 April 2003

Oleh

Pembimbing Ketua



Drs. Ec. Djoko Mursinto, M.Ec

NIP. 130935811

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Manajemen

Program Pascasarjana

Universitas Airlangga



Drs. Sri Gunawan, M.Com., DBA

NIP. 131653420

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Telah diuji pada
Tanggal 21 April 2003
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Profesor Dr. Iman Syakir, SE.
Anggota : 1. Drs. Ec. Djoko Mursinto, M.Ec.
2. Drs. Ec. Achmadi, M.S.
3. Drs. Ec. Djoni Budiardjo, M.Si.
4. Drs. Ec. Widijarto, MBA.



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Drs, Ec. Djoko Mursinto, M, Ec., selaku pembimbing ketua yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan serta pendapat yang sangat berharga sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi penulis mengenai metodologi dan sistematika penulisan dalam Tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Med. H. Puruhito, dr atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.

Direktur Program pascasarjana Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhamad Amin, dr atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

RINGKASAN

Sejak diberlakukannya paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto "88 telah membawa perubahan struktur perbankan Indonesia secara keseluruhan termasuk di Provinsi Jawa Timur. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya jumlah kantor bank baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Peningkatan jaringan kantor bank di Provinsi Jawa Timur telah mendorong peningkatan volume usaha bank, penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit oleh bank umum maupun BPR. Bila dilihat berdasarkan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, perbankan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan pada posisi Mei 2002 penghimpunan dana masyarakat menduduki urutan keempat, dan penyaluran kredit berada di urutan kedua setelah Kabupaten Surabaya. Sejalan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan BPR mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah. Analisis perbedaan penghimpunan dana dan penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada Pemerintah Daerah maupun lembaga pengawas dan pembina bank dalam rangka menetapkan kebijakan yang mendukung optimalisasi peranan BPR dalam perekonomian daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data rasio dan merupakan data cross section posisi bulan Juni 2002, sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yang keduanya merupakan variabel bebas, yaitu jumlah penghimpunan dana masyarakat (tabungan dan deposito) dan jumlah penyaluran kredit BPR-BPR dengan kinerja keuangan sehat yang dibedakan kedalam tiga kategori wilayah, yaitu wilayah kecamatan dengan potensi ekonomi lebih, sedang dan kurang. Rancangan analisis data menggunakan model statistik *Analysys Of Varian (ANOVA)* atau F test, dan analisis pendukung dilakukan dengan model regresi atas dasar data series jumlah penghimpunan dana dan penyaluran kredit selama tiga belas bulan.

Dari hasil penelitian data penghimpunan dana dan penyaluran kredit diketahui bahwa F test hitung lebih kecil dari F test tabel, sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik pada jumlah penghimpunan dana maupun jumlah penyaluran kredit BPR-BPR dengan kinerja "sehat" yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi lebih, sedang dan kurang. Porsi penyebaran kredit terbesar disalurkan di kecamatan lain (di luar lokasi BPR namun masih berada di Kabupaten Sidoarjo) sebesar 34,23 %, diikuti oleh kabupaten lain 26,44%, di Kota Surabaya 21,27% dan terkecil di kecamatan setempat (lokasi BPR) 18,00%. Korelasi antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit terhadap BPR yang diteliti menunjukkan korelasi yang signifikan.

Keberadaan BPR di Kabupaten Sidoarjo secara umum telah mampu mendukung perekonomian Kabupaten Sidoarjo, namun belum secara maksimal mendukung terhadap perekonomian di tingkat kecamatan lokasi masing-masing BPR. Kemudian sebagai lembaga intermediasi secara keseluruhan juga telah mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, walaupun tidak selalu BPR yang berada di kecamatan dengan potensi yang lebih akan lebih baik daripada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan kurang.

Untuk memaksimalkan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan himbauan kepada investor atau inisiatif Pemerintah Daerah untuk membuka BPR baru di beberapa kecamatan yang sampai saat ini belum ada BPR-nya. Bagi Bank Indonesia sebagai lembaga regulator perbankan, dalam memberikan izin pembukaan BPR baru agar memprioritaskan lokasi kecamatan yang jumlah BPR-nya belum ada atau masih kurang.

ABSTRACT

In line with constitution No. 22, 1999 about Government of Province, rural banking (*Bank Perkreditan Rakyat/BPR*) in Sidoarjo regency have essential function to enforce of economy recovery specially at district area in Sidoarjo Regency. Therefore, this study to try to analysis the difference of saving and deposit with distribution of credit at rural banking or BPR in Sidoarjo Regency.

The objective of this study was : 1. to know the difference of saving and deposit, and distribution of credit by BPR at distric area with more economy prospect, enough prospect, and low prospect in Sidoarjo Regency, 2. to know the capacity of BPR to enforce of district economy at BPR location area, and 3. to know the BPR intermediation function as intermediary institution between surplus unit (depositor) and deficit unit (borrower). 4. to know the ranking of each BPR financial performance.

The main analysis technique in this study is Analysis Of Variance (ANOVA) model with crosssection data of saving and deposit, and credit in June 2002. Next, other analysis models are regression model with series data of saving and deposit, and credit for threeten month before (June 2001 – June 2002) to exam of correlation or intermediation function, and others qualitative models like as analysis of credit distribution.

The first result of this study, showed that there isn't significant difference of saving and deposit between BPR at distric area with more economy prospect, enough prospect, and low prospect in Sidoarjo Regency. The second result of analysis showed that there isn't significant difference of credit distribution between BPR at distric area with more economy prospect, enough prospect, and low prospect in Sidoarjo Regency. And the result of the third analysis showed that each BPR have success to enforce of regional economic in Sidoarjo Regency, however less success to enforce of district economy at BPR location area, because Rp 24,01 billion or 47,71 % of credit distributed in Surabaya, and only Rp 9,06 billion or 18,00 % of credit distributed at BPR district location area.

Correlation analysis with regression model showed that in all BPR have success in implementation of intermediation fuction significantly. However there are six BPR individually less success in implementation of intermediation fuction, coused internal management problem. The last qualitative analysis is ranking of BPR financial performance showed that four BPR in the best five ranking, where located at distric area with enough economy prospect. That mean, not always BPR at distric area with more economy prospect are better than BPR at distric area with enaough or less economy prospect, included in intermediation function and financial performance.

Key words : Saving deposit and credit, Sidoarjo regency, rural banking, intermediation Function and to enforce district economy.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Persetujuan.....	iv
Penetapan Panitia Penguji.....	v
Ucapan terima kasih.....	vi
Ringkasan.....	vii
Abstract.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	17
2.1. Penelitian Terdahulu.....	17
2.2. Tinjauan Pustaka.....	19
2.2.1 Pengertian Bank.....	19
2.2.2 Jenis Bank.....	21
2.2.3 Fungsi Bank dan Lembaga Keuangan.....	25

2.2.4. Penghimpunan Dana Masyarakat.....	29
A. Pengertian Simpanan.....	29
B. Pengertian Deposito Berjangka.....	30
C. Pengertian Giro.....	31
D. Tabungan.....	32
E. Tingkat Suku Bunga.....	33
2.2.5 Penyaluran Kredit.....	35
A. Pengertian Kredit.....	35
B. Alokasi Portfolio Kredit.....	40
2.2.6 Pengertian Jasa.....	41
A. Pemasaran Jasa.....	42
B. Ciri-ciri Jasa Bank	43
2.2.7 Tingkat Kesehatan Bank.....	45
A. Pelaksanaan Penilaian.....	47
B. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	50
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	51
3.1. Kerangka Konseptual.....	51
3.2. Hipotesis.....	56
3.3. Model Analisis.....	56
3.3.1 Analysis Of Variance (ANOVA)	56
3.3.2 Analisis Regresi (Regression Analysis)	59
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	61
4.1. Identifikasi Variabel.....	61
4.2. Definisi Operasional Variabel.....	62
4.3. Jenis dan Sumber Data.....	63
4.4. Prosedur Penentuan Sampel.....	64
4.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	66

4.6. Teknik Analisis.....	66
4.6.1 Model Analysis Of Variance (ANOVA)	66
4.6.2 Analisis Regresi.....	68
BAB 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1. Gambaran Daerah Penelitian.....	70
5.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kabupaten Sidoarjo	70
5.1.2 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo.....	73
5.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77
5.1.4 Lembaga Perbankan.....	78
5.2. Diskripsi Masing-masing Variabel.....	83
5.2.1 Perkembangan Penghimpunan Dana.....	84
5.2.2 Penyaluran Kredit.....	88
5.2.3 Perbandingan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit	91
5.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis.....	95
5.3.1 Analysis Of Variance (ANOVA)	95
5.3.2 Analisis Regresi.....	98
A. BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan	
dengan potensi ekonomi tinggi.	99
B. BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan	
dengan potensi ekonomi sedang.	100
C. BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan	
Dengan potensi ekonomi rendah.....	100
5.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	101
5.4.1 Pengujian hipotesis dengan model analisis ANOVA.....	101
5.4.2 Pengujian hipotesis dengan model analisis Regresi.....	102
5.5. Kemampuan BPR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Daerah.....	108
5.6. Pengukuran Keberhasilan BPR Berdasarkan Aspek Penilaian	
Tingkat Kesehatan	113

BAB 6 KESIMPUNAN DAN SARAN.....	119
6.1. Kesimpulan.....	119
6.2. Saran-saran.....	121

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kantor, Total Assets, Penghimpunan Dana Masyarakat dan Penyaluran Kredit Perbankan di Provinsi Jawa Timur Periode Desember 1991, 1997, 2001 dan Mei 2002.....	5
Tabel 1.2 Perkembangan Penghimpunan Dana dan menyaluran Kredit Pada Bank Umum per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Periode Desember 1997, 2001 dan Mei 2002.....	6
Tabel 1.3 Perkembangan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Penyaluran Kredit Perbankan di Kabupaten Sidoarjo.....	7
Tabel 1.4 Perkembangan Jumlah Kantor BPR di Kabupaten Sidoarjo Periode Desember 1991, 1997, 2001 dan Mei 2002 (Termasuk Kantor Cabang BPR).....	9
Tabel 1.5 Perkembangan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BPR-BPR Di Kabupaten Sidoarjo (Periode Januari s/d Mei 2002).....	10
Tabel 5.1 Luas wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001.....	71
Tabel 5.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001.....	72
Tabel 5.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1996 – 2000 (Dalam jutaan Rp).....	74
Tabel 5.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1996 – 2000 (Dalam Persentase)..	75
Tabel 5.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001 (Dalam Jutaan Rp).....	78
Tabel 5.6 Jumlah Bank dan Kantor Bank Menurut Jenisnya di Kabupaten	

	Sidoarjo Tahun 2000 – Mei 2002.....	79
Tabel 5.7	Perkembangan Total Aktiva Bank Umum dan BPR di Kabupaten Sidoarjo Tahun 1991 – Mei 2002 (Dalam Jutaan Rupiah).....	80
Tabel 5.8	Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valutas Asing pada Bank Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 1997 – Mei 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)	81
Tabel 5.9	Perkembangan Penyaluran Kredit Rupiah dan Valuta Asing Pada Bank Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun 1997 – Mei 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)	83
Tabel 5.10	Perbandingan Posisi Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Pada 15 (lima belas) BPR yang Berada di Kecamatan Dengan Potensi Ekonomi Tinggi, Sedang dan Rendah di Kabupaten Sidoarjo.....	85
Tabel 5.11	Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Terhadap 15 BPR Dengan Kinerja Sehat di Kabupaten Sidoarjo	104
Tabel 5.12	Perpencaran Penyaluran Kredit oleh BPR Dengan Kinerja Sehat Berada di Kecamatan Dengan Potensi Ekonomi Lebih, Sedang Dan Kurang di Kabupaten Sidoarjo.....	109
Tabel 5.13	Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit serta Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Dengan Kinerja Sehat di Kabupaten Sidoarjo.....	114
Tabel 5.14	Hasil Rangking Tabel Dua Jalan Pengukuran Keberhasilan BPR Berdasarkan Fungsi Intermediasi dan Faktor CAMEL Terhadap 15 BPR di Kabupaten Sidoarjo	116
Tabel 5.15	Rangking Penilaian Kinerja 15 BPR yang Berada di Kecamatan Dengan Potensi Ekonomi Tinggi, Sedang dan Rendah di Kabupaten Sidoarjo	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Proses Intermediasi Keuangan.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perhitungan One Way Anova Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 15 BPR dengan kinerja sehat di Kabupaten Sidoarjo.
- Lampiran 2 : Perhitungan One Way Anova Penyaluran Kredit 15 BPR dengan Kinerja sehat di Kabupaten Sidoarjo.
- Lampiran 3 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR A1.
- Lampiran 4 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR A2.
- Lampiran 5 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR A3.
- Lampiran 6 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR A4.
- Lampiran 7 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR A5.
- Lampiran 8 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Secara Total BPR A1 s/d A5.
- Lampiran 9 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR B1.
- Lampiran 10 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR B2.
- Lampiran 11 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR B3.
- Lampiran 12 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR B4.
- Lampiran 13 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR B5

- Lampiran 14 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Secara Total B1 s/d B5.
- Lampiran 15 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR C1.
- Lampiran 16 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR C2.
- Lampiran 17 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR C3.
- Lampiran 18 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR C4.
- Lampiran 19 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit BPR C5.
- Lampiran 20 : Perhitungan Regresi Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Secara Total C1 s/d C5.

BAB I

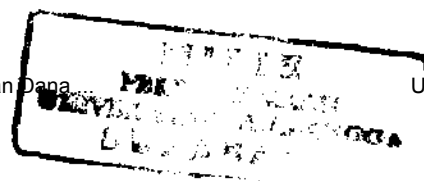
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat terpuruk sebagai akibat dari bencana krisis ekonomi yang berkepanjangan. Untuk membangkitkan perekonomian yang sedemikian parah ini, tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan berupaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sistem keuangan yang dilakukan secara simultan dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan mendorong kelancaran produksi secara nasional. Untuk itu sangat dibutuhkan keberadaan lembaga perbankan yang dapat berperan sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional.

Kehadiran bank dapat mempercepat proses recovery perekonomian apabila perbankan tersebut dapat melakukan optimalisasi fungsinya sebagai lembaga Intermediasi (perantara) bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Ketersediaan kantor bank yang cukup dan merata serta dapat memenuhi pelayanan kepada seluruh masyarakat merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan.

Ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-



lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem perbankan yang sehat ditandai dengan keberadaan lembaga perbankan yang berfungsi secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu menghadapi persaingan, mampu melindungi dana masyarakat, dan mampu menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat lainnya dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menetapkan pula bahwa jenis bank yang ada di Indonesia adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan yang sangat prinsip antara keduanya adalah bahwa selain BPR volume usahanya relatif lebih kecil, BPR merupakan lembaga perbankan yang dalam operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral (tidak menghimpun dana dalam bentuk giro) dan tidak menyelenggarakan transaksi valuta asing serta tidak diperbolehkan melakukan praktek perasuransian.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditetapkan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi dan membina bank. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian wewenang tersebut adalah agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain. Hal ini dimaksudkan agar dapat terwujud sistem perbankan yang sehat, mampu bersaing dan berkembang secara wajar dalam melaksanakan fungsinya.

Operasional bank sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang ketat dan harus ditaati. Hal ini tidak seperti jenis badan hukum yang sama lainnya yang tidak harus diawasi sedemikian ketat, sementara bank harus diawasi dan tunduk terhadap

ketentuan yang cukup banyak dan mengikat. Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary, bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa adanya jaminan apapun yang dapat dipegang oleh nasabah selain hanya kepercayaan semata dari nasabah untuk menempatkan dananya pada bank, sementara perusahaan lain tidak menghimpun secara langsung dana dari masyarakat. Atas dasar itu sebagian besar dana yang dikelola oleh bank adalah merupakan dana masyarakat maka keamanan atas pembayaran kembali dana tersebut harus terjaga.

Terlepas dari kondisi tersebut di atas, saat ini dunia perbankan Indonesia mengalami guncangan yang sangat hebat sebagai akibat dari krisis ekonomi dan sistem keuangan yang berkepanjangan. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terganggunya operasional perbankan antara lain faktor manajemen, baik yang menyangkut pelaku atau pengurus maupun faktor sistem operasionalnya. Satu hal yang sangat prinsip dan sering menjadi faktor penyebab menurunnya kinerja BPR adalah pengelolaan sisi pasiva dan aktiva, mengingat unsur terbesar yang menjadi sumber pendapatan bank adalah bunga atas kredit yang disalurkan.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan industri perbankan, baik yang menyangkut mengenai kelembagaan, operasional, kinerja keuangan dan produk-produk serta pelayanan yang diberikan kepada nasabah baik kepada nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah bank yang menempatkan dananya pada bank yang dapat berupa tabungan, deposito dan giro atau simpanan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas pinjaman atau kredit dari bank, yang mempunyai kewajiban untuk melunasinya.

Berdasarkan buku statistik keuangan dan ekonomi daerah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia Surabaya, tercatat bahwa pertumbuhan perbankan di Propinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak dikeluarkannya paket Kebijakan 27 Oktober 1988, atau dikenal dengan Pakto "88". Kebijakan ini telah membawa perubahan terhadap struktur perbankan di Jawa Timur maupun Indonesia secara keseluruhan, dimana ketentuan mengenai pendirian dan modal bank serta pembukaan kantor bank diberikan kemudahan. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah bertumbuhnya jumlah kantor bank di Propinsi Jawa Timur baik pada kantor bank Umum, yang mencakup Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Unit, maupun kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Peningkatan jaringan kantor bank di Provinsi Jawa Timur baik sebelum masa krisis, pada masa krisis dan periode pasca krisis secara langsung memberikan dampak peningkatan baik dari segi volume usaha maupun penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit baik pada bank umum maupun BPR. Bila dilihat perkembangan antara bank umum dan BPR di Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir Mei 2002, tampak adanya suatu kecenderungan yang berbeda. Di mana perkembangan baik total assets, penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit pada bank umum cenderung mengalami penurunan, sementara pada periode yang sama perkembangan yang terjadi pada BPR justru mengalami peningkatan yang relatif stabil.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Kantor, Total Assets, Penghimpunan Dana Masyarakat dan Penyalutan Kredit Perbankan di Provinsi Jawa Timur Periode Desember 1991, 1997, 2001 dan Mei 2002)
(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Desember 1991		Desember 1997		Desember 2001		Mei 2002	
	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR
Jumlah Kantor *)	1.224	214	1.612	400	1.751	454	1.730	468
Total Assets	17.044.393	161.124	44.090.365	454983	90.181.184	1.245.675	89.886.144	1.389.164
Simpanan :								
Giro	1.580.516	-	5.404.054	-	17.382.848	-	15.278.393	-
Tabungan	1.955.779	17.342	9.016.135	127.127	22.849.899	248.522	22.649.977	249.088
Deposito	6.581.360	46.685	12.630.768	194.701	47.421.371	514.828	39.654.867	617.401
Jumlah	8.144.534	64.027	27.058.994	321.828	87.654.118	763.350	77.583.237	866.489
Total Kredit	13.289.153	177.461	31.653.052	397.536	36.974.547	912.797	33.563.652	1.030.515

Keterangan : *) Meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Unit.

Sumber : Buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Bank Indonesia Mei 2002

Seperti terlihat pada Tabel 1.1 dari perkembangan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit khususnya pada bank umum pada periode sebelum krisis (Tahun 1991 s.d tahun 1997) tampak terus mengalami peningkatan, hal ini berlanjut sampai dengan akhir tahun 2001. Kemudian sampai dengan akhir Mei 2002 baik penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit mengalami penurunan. Kemudian bila dilihat berdasarkan urutan yang dominan untuk seluruh wilayah Kabupaten di Jawa Timur, maka dari periode sebelum krisis, pada saat krisis maupun pasca krisis tampak bahwa Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pertumbuhan yang stabil bahkan pada posisi akhir Mei 2002 untuk penghimpunan dana masyarakat menduduki peringkat keempat dan penyaluran kredit pada peringkat kedua setelah Kabupaten Surabaya. Untuk jelasnya lihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Penyaluran Kredit
Pada Bank Umum per Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
Periode Desember 1997, 2001 dan Mei 2002)
(Dalam jutaan rupiah)

Kabupaten	Desember 1997		Desember 2001		Mei 2002	
	Simpanan	Kredit	Simpanan	Kredit	Simpanan	Kredit
Surabaya	19.063.410	15.947.140	58.190.837	14.917.809	47.652.441	12.670.589
Mojokerto	23141	831.235	948.879	784.604	971.615	857.085
Gresik	173.515	2.745.337	1.709.921	2.754.273	1.653.818	2.640.853
Sidoarjo	212.020	3.540.126	1.942.513	3.991.888	1.934.120	3.717.598
Lamongan	15.734	77.244	1.354.292	201.047	440.004	217.957
Jombang	201.948	193.328	754.676	332.338	721.307	353.886
Pamekasan	154.844	86.253	380.815	173.533	324.474	197.663
Sumenep	82.091	74.758	367.500	210.384	452.775	222.358
Kediri	958.493	607.539	3.409.897	2.851.343	3.499.254	1.267.629
Madiun	496.280	230.897	1.478.786	406.971	1.353.698	457.183
Blitar	263.307	141.604	1.056.439	318.899	1.032.721	344.270
Nganjuk	80.611	112.399	257.208	234.980	265.568	257.960
Tulungagung	311.739	214.014	1.050.841	365.237	1.001.618	380.114
Trenggalek	62033	61.401	278.348	139.089	301.141	147.385
Ngawi	63.700	62.284	259.674	243.680	285.267	269.552
Magetan	73.833	44.169	261.092	189.331	286.825	202.987
Jember	635.308	478.902	1.766.872	739.614	1.631.956	814.549
Banyuwangi	325.191	1.128.765	1.064.429	530.560	1.050.058	561.781
Situbondo	104.763	105.451	398.908	217.093	417.688	251.645
Bondowoso	47.094	82.041	342.564	212.435	313.125	239.990
Malang	2.252.361	2.267.894	6.932.672	2.997.625	7.299.434	3.029.006
Probolinggo	332.227	634.029	708.426	694.133	724.972	710.792
Pasuruan	72.552	1.096.869	1.111.614	1.251.293	1.205.094	1.410.962
Lumajang	68.168	152.416	480.251	211.993	476.634	232.878
Bojonegoro	156.921	206.562	468.144	237.534	44.642	261.980
Tuban	142.867	235.415	450.030	1.160.347	496.566	1.172.625
Bangkalan	43.783	78.475	322.354	220.136	333.139	230.330
Lainnya *)	15.734	126.505	905.607	386.378	1.017.283	472.045
Prov. Jatim	26.433.668	31.653.052	87.654.118	36.974.547	77.583.237	33.563.652

Keterangan : *) Meliputi Kab. Sampang, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan

Sumber : Buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Bank Indonesia Mei 2002

Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar khususnya pada sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian serta perikanan. Seiring dengan penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat, maka total assets juga mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Dari sejak digulirkannya kebijakan Pakto "88", total assets perbankan baik bank umum maupun BPR terus mengalami peningkatan, demikian juga terhadap penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito atau giro. Dalam penyaluran dana yang sebagian besar berupa kredit tercatat juga mengalami peningkatan yang cukup berarti ke semua sektor ekonomi yang ada.

Tabel 1.3

Perkembangan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Penyaluran Kredit
Perbankan di Kabupaten Sidoarjo.
Periode Desember 1991, 1997 2001 dan Mei 2002.
(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Desember 1991		Desember 1997		Desember 2001		Mei 2002	
	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR	Bank Umum	BPR
Total Assets	196.586	26.470	660.483	89.735	1.693.440	175.561	1.466.672	193.181
Simpanan :								
a. Giro	4.541	-	41.614	-	255.508	-	287.925	-
b. Tabungan	10.056	3.040	72.388	27.739	861.174	36.067	873.774	37.443
c. Deposito	21.677	8.846	98.018	17.697	825.831	64.383	772.421	71.039
Jumlah	29.002	11.886	212.020	45.436	1.942.513	100.450	1.934.120	108.482
Total Kredit	37.935	19.117	3.540.126	61.572	3.991.888	126.716	3.717.598	136.869

Sumber : Buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Bank Indonesia Desember 2001

Seperti tampak pada Tabel 1.3, perkembangan kinerja keuangan perbankan di Kabupaten Sidoarjo dari sejak diberlakukannya Pakto "88" sampai dengan periode sebelum krisis (posisi Desember 1997), tampak bahwa besaran pos tertentu yang meliputi total assets, dana masyarakat yang terdiri dari (giro, tabungan, dan deposito berjangka) serta total kredit baik pada bank umum maupun pada BPR tampak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara pada periode selanjutnya dimana Indonesia mengalami goncangan ekonomi yang berdampak pada krisis ekonomi

termasuk sektor keuangan, maka tidak seperti kinerja keuangan perbankan secara nasional yang cenderung mengalami penurunan, namun terbukti bahwa kinerja perbankan di Kabupaten Sidoarjo secara umum mengalami peningkatan yang signifikan. Tampak bahwa periode sebelum krisis (Desember 1997) sampai dengan Desember 2001, pos-pos tertentu tersebut secara umum menunjukkan peningkatan baik penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit kepada masyarakat. Walaupun pada posisi Mei 2002 penghimpunan dana dan penyaluran kredit pada bank umum mengalami penurunan, namun pada BPR tetap menunjukkan adanya peningkatan.

Bila dilihat secara spesifik khususnya mengenai perkembangan kinerja keuangan BPR, tampak bahwa dari periode sebelum krisis, periode krisis dan periode pasca krisis terus mengalami peningkatan yang lebih stabil. Dengan kondisi yang demikian maka tingkat kemampuan BPR dalam penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran kredit sama sekali tidak terpengaruh oleh faktor krisis ekonomi. Sehingga menjadi suatu fenomena tersendiri bahwa ternyata dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan kinerja BPR mampu menunjukkan ketahanan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary.

Seperti tampak pada Tabel 1.4, maka penyebaran kantor bank khususnya BPR di wilayah Kabupaten Sidoarjo tidak merata, dimana terdapat wilayah Kecamatan yang jumlah BPR-nya lebih banyak dan wilayah Kecamatan lainnya yang jumlah BPR-nya lebih sedikit. Sebagian besar jumlah BPR lebih terkonsentrasi pada daerah kecamatan yang relatif berdekatan dengan wilayah Kota Surabaya.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Kantor BPR di Kabupaten Sidoarjo
Periode Desember 1991, 1997, 2001 dan Mei 2002
(Termasuk Kantor Cabang BPR)

NO	Kecamatan	Desember 1991	Desember 1997	Desember 2001	Mei 2002
1.	Jabon	0	0	0	0
2.	Prambon	0	0	0	0
3.	Kremlung	0	1	1	1
4.	Tulangan	1	4	4	4
5.	Balombangendo	0	0	0	0
6.	Sukodono	0	1	1	1
7.	Porong	7	8	7	7
8.	Tanggulangin	0	0	0	0
9.	Wonoayu	0	0	0	0
10.	Candi	1	7	7	7
11.	Krian	5	6	6	6
12.	Tarik	1	1	1	1
13.	Buduran	0	1	1	1
14.	Sidoarjo	2	5	5	4
15.	Sedati	2	3	3	2
16.	Gedangan	2	5	4	4
17.	Taman	13	14	14	14
18.	Waru	17	20	15	13
	Jumlah	51	76	69	65

Sumber : Bank Indonesia Surabaya.

Dalam perkembangannya, dari keseluruhan BPR yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdapat BPR yang menghadapi permasalahan struktural dan secara ekonomis tidak beroperasi bahkan pada akhir tahun 2001 terdapat beberapa BPR yang kegiatan operasionalnya dibekukan. Munculnya permasalahan dalam operasional bank dapat disebabkan oleh beberapa hal baik bersumber dari perilaku kepengurusan, ketidakmampuan menghadapi risiko (risiko pasar, kredit maupun risiko tingkat bunga), maupun ketidakmampuan dalam menghadapi persaingan dengan BPR yang lain.

Sesuai dengan penilaian kinerja keuangan BPR yang dilakukan oleh Bank Indonesia Surabaya yang dilakukan dengan penilaian tingkat kesehatan secara bulanan terhadap 58 kantor pusat BPR, selama lima bulan terakhir sampai dengan posisi Mei 2002 tampak pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Perkembangan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BPR-BPR
di Kabupaten Sidoarjo (Periode Januari s/d Mei 2002)

Predikat	Januari 2002	Februari 2002	Maret 2002	April 2002	Mei 2002
Sehat	44	44	44	44	48
Cukup Sehat	3	4	4	4	2
Kurang Sehat	2	1	1	1	1
Tidak Sehat	9	9	9	9	7
Jumlah BPR	58	58	58	58	58

Sumber : Bank Indonesia Surabaya

Perkembangan kinerja BPR ditentukan oleh beberapa faktor tidak hanya tergantung pada faktor permodalan maupun manajemen namun juga dipengaruhi oleh tempat atau lokasi keberadaan kantor BPR. Tidak semua BPR yang sehat berada pada wilayah Kecamatan yang potensi ekonominya tinggi, dan tidak semua BPR yang kurang atau tidak sehat berada pada wilayah Kecamatan yang potensinya ekonominya rendah atau tidak baik. Dengan demikian, pada semua wilayah Kecamatan dengan potensi ekonomi baik, cukup baik dan tidak baik terdapat BPR yang kinerjanya Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat maupun Tidak Sehat.

Berbeda dengan bank umum, BPR selain lebih kecil volume usahanya, juga kegiatannya cukup terbatas baik dari segi wilayah kerjanya maupun jenis pelayanan

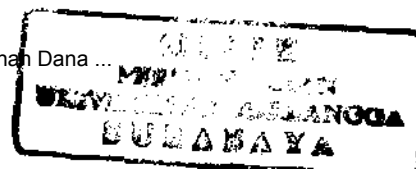
yang diberikan kepada masyarakat. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR, wilayah kerja BPR tidak lagi dibatasi pada suatu wilayah tertentu, namun demikian diberikan batasan sesuai dengan kemampuan penyetoran modalnya. BPR yang dibuka di wilayah Kabupaten modal disetor minimal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan di wilayah Provinsi modal setor minimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan untuk BPR yang akan beroperasi di wilayah Ibu Kota negara dan Jakarta, Bogor dan Bekasi (Jabotabek) dipersyaratkan modal setor minimal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun dari segi operasional pada saat ini wilayah kerja BPR tidak dibatasi secara khusus, namun kembali pada misi dan tujuan awal dibentuknya BPR sebagaimana dituangkan dalam Pakto,⁸⁸ dimana wilayah operasional BPR dibatasi hanya terbatas pada wilayah satu kecamatan, maka tujuan utama BPR adalah untuk melayani jasa perbankan bagi masyarakat di sekitar kecamatan lokasi BPR dalam rangka mendorong usaha-usaha produktif dan kebutuhan konsumtif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian sasaran akhir daripada dibukanya BPR

adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah kecamatan sekitar lokasi BPR dan secara umum diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepada pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya termasuk didalamnya bidang keuangan daerah, maka kehadiran BPR-BPR di suatu wilayah daerah dapat dipandang sebagai sumber pendapatan bagi daerah khususnya dalam pembayaran pajak daerah. Dari segi pengembangan ekonomi daerah, BPR memiliki peranan yang sangat dominan khususnya dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan fungsinya sebagai lembaga perantara (intermediary) dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana baik untuk keperluan investasi maupun pemenuhan modal kerjanya.

Di sisi lain kehadiran BPR juga akan menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut, sehingga juga akan membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan lain seperti ketenaga kerjaan dan pengangguran yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, serta membantu pemerintah daerah dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan penyerapan tenaga kerja tersebut secara otomatis juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya kepada karyawan BPR, sehingga juga dapat meningkatkan tingkat kemakmuran penduduk daerah setempat. Oleh karena itu mengingat di Kabupaten Sidoarjo saat ini terdapat 65 kantor BPR yang beroperasi, maka agar dapat memberikan dukungan secara maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, kinerja keuangan BPR-BPR



dimaksud perlu ditingkatkan. Atas dasar permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Apakah ada perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana oleh BPR di Kabupaten Sidoarjo yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah.?
- 1.2.2 Apakah ada perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit oleh BPR di Kabupaten Sidoarjo yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah.?
- 1.2.3 Apakah BPR-BPR di Kabupaten Sidoarjo telah mampu melaksanakan intermediasi keuangan sesuai dengan fungsinya.?
- 1.2.4 Apakah BPR di Kabupaten Sidoarjo mampu memberdayakan ekonomi rakyat dalam era Otonomi Daerah.?
- 1.2.5 Bagaimanakah peringkat kinerja keuangan masing-masing BPR di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari kemampuan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit dan penilaian faktor CAMEL (Capital, Assets quality, Manajement, Earning dan Liquidity).?

1.3. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah seperti telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1.3.1 Ingin mengetahui perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana oleh BPR di Kabupaten Sidoarjo yang berada di Kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah.
- 1.3.2 Ingin mengetahui perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit oleh BPR di Kabupaten Sidoarjo yang berada di Kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah.
- 1.3.3 Ingin mengetahui kemampuan BPR-BPR di Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan.
- 1.3.4 Ingin mengetahui kemampuan BPR untuk memberdayakan ekonomi rakyat dalam era Otonomi Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- 1.3.5 Ingin mengetahui peringkat kinerja keuangan masing-masing BPR di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari kemampuan penghimpunan dana, penyaluran kredit dan faktor CAMEL (Caital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang manajemen yang berkaitan dengan industri perbankan.

- 1.4.2 Sebagai sumbangan pemikiran kepada semua pihak mengenai gambaran kondisi BPR di Kabupaten Sidoarjo, dalam pengambilan keputusan baik bagi pemilik BPR yang telah ada maupun bagi calon pemilik yang akan membuka BPR di daerah tersebut.
- 1.4.3 Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya mengenai penyebaran penyaluran kredit oleh BPR yang berada di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pengambilan kebijakan guna pengembangan daerah.
- 1.4.4 Sebagai sumbangan pemikiran bagi Bank Indonesia Surabaya sebagai otoritas pengawas dan pembina bank, dalam menentukan arah kebijakan perbankan khususnya BPR di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yang meliputi :

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan pustaka, berisi tentang hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian, dalam Bab ini akan mengemukakan mengenai Kerangka Konseptual, Pemecahan penelitian, perumusan hipotesis dan model analisis.

- Bab IV Metode penelitian, berisi tentang identifikasi variabel, definisi operasional masing-masing variabel, cara pengumpulan sampel, cara penentuan sampel, sumber data dan teknik analisis yang digunakan.
- Bab V Analisis dan Pembahasan, berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, deskripsi masing-masing variabel, analisis model, pembuktian hipotesis dan pembahasan.
- Bab VI Kesimpulan dan saran, yang berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dan saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, dilakukan oleh Rachmat Maulana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga tahun 1996 berupa Karya Tulis Utama dengan judul “ANALISA PENYALURAN KREDIT PADA BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA DI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 1989/1990 SAMPAI DENGAN TAHUN 1994/1995”. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Of Variance (ANOVA) atau F test dan Selisih Dua Rata-rata dengan menggunakan sembilan sample. Obyek penelitiannya mengenai perbankan khususnya mengenai penyaluran kredit pada bank pemerintah dan bank swasta di Jawa Timur periode tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1994/1995.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain kemampuan penyerapan dana pihak ketiga bank swasta lebih besar dibandingkan dengan bank pemerintah di Jawa Timur selama kurun waktu tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1994/1995. Selain itu disebutkan pula bahwa selama kurun waktu tersebut distribusi posisi pinjaman, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta tidak merata di Jawa Timur. Kemudian disimpulkan pula bahwa posisi pinjaman pada sektor industri merupakan prioritas utama bagi bank pemerintah, sedangkan posisi pinjaman untuk sector perdagangan, hotel dan restoran merupakan prioritas utama bagi bank swasta di Jawa Timur. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama memiliki

obyek bank dan model analisis yang digunakan adalah Analisis Varian (ANOVA). Sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitiannya pada Bank Perkreditan Rakyat dan lokasinya berada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penekanan pada penelitian terdahulu pada diskripsi penyaluran kredit berdasarkan jenis dan sektor ekonominya.

Penelitian lainnya yang juga sejenis dengan penelitian ini dilakukan oleh Joko Suwarno, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Airlangga tahun 1998 berupa Karya Tulis Utama dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KANTOR CABANG SEKOTAMADYA SURABAYA PERIODE CAWU I/1994 SAMPAI DENGAN CAWU I/1998 (Studi Kasus Pada Bank BNI)". Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Of Variance (ANOVA) atau F test dengan menggunakan 7 (tujuh) sample dan 13 (tiga belas) kasus. Obyek penelitiannya mengenai perbankan khususnya mengenai penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit serta kinerja keuangan pada tujuh BNI Kantor Cabang Surabaya, Tanjung Perak, Jembatan Merah, Urip Sumoharjo, Kusuma Bangsa, UNAIR dan Kantor Cabang Graha Pangeran.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata posisi baik untuk penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran kredit antar masing-masing tujuh Kantor Cabang se kotamadya Surabaya. Selain itu disebutkan pula bahwa kinerja masing-masing Kantor Cabang yang diteliti pada Cawu I/98, diketahui bahwa tiga Kantor Cabang memiliki kinerja di atas rata-rata dan empat Kantor Cabang lainnya berada di bawah rata-rata. Kemudian disimpulkan pula bahwa dampak krisis moneter telah mempengaruhi dalam penghimpunan dana

masyarakat maupun penyaluran kredit. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama memiliki obyek bank dan model analisis yang digunakan adalah Analysis Of Variance (ANOVA). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah obyek penelitiannya pada Bank Perkreditan Rakyat dan lokasinya berada di Kabupaten Sidoarjo.

2.2. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka akan diungkapkan teori-teori yang akan digunakan sebagai pijakan analisis dalam pelaksanaan penelitian ini, dan tentunya teori-teori yang digunakan adalah hal-hal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pada Bab I mengenai ketentuan umum, disebutkan pada pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yusuf (1992: 1) menyatakan bahwa bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dengan sektor yang kekurangan dana (minus). Bank menerima simpanan dari pihak yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dari pengertian tersebut di atas diharapkan perbankan lebih berperan dalam memobilisasi dana masyarakat, yaitu pertama menarik dana berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau dalam

bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kedua, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian ketiga, memberikan pelayanan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Untuk itulah maka bank mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan pemerataannya.

Menurut Stuart (1989 : 107) dikatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Kemudian menurut Abdurrachman (1990 : 164) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang dan bertindak sebagai tempat menyimpan benda berharga, serta membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut Johnson (1985; 3) :

“ A commercial bank is a financial intermediary that provides a financial services product in an envolving industry. The industry is characterized by changing competition, regulation, and technology. The central activity of banking remains the securing of deposit. Those two activities will likely remain as the major activities of commercial banks. Changes in competition, regulation and technology will have an impact on how those two activities are delivered as a product to consumers and commercial enterprises”.

Kemudian menurut Marcia (1983 ; 2)

“ The basic nature of banking is that banks act as an intermediary between lenders and borrowers. Specifically, they gather funds from consumers and business firms and lend these to borrower. In intermediating between borrowers and lenders, bank do three things : (1) they gather funds; (2) they substitute their credit for that of ultimate borrowers (i.e., they make credit judgments and assume credit risks); and (3) the assume interest rate risk because intermediation generally calls for a maturity transformation – using shortterm deposits to fund longer term loans. To the extent that banks perform these functions efficiently, the should expect to receive some reward; that reward is the basic source of banks profits.

2.2.2 Jenis Bank

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pasal 5 ditetapkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat, atau yang disebut BPR

Adapun yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian maka usaha bank umum tentunya lebih besar dari usaha BPR baik dalam usaha penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyalurannya, dan yang paling menonjol adalah bahwa BPR tidak diperkenankan untuk menghimpun giro dan melakukan kegiatan valuta asing, sementara bank umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Ditetapkan pula dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 10 tahun 1998 pasal 6, bahwa usaha bank umum

meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, bank umum juga dapat :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan usaha BPR yang diperkenankan sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Namun demikian BPR dilarang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;

- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang.

2.2.3 Fungsi Bank dan Lembaga Keuangan

Ditetapkan pada pasal 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan dalam menjalankan operasionalnya perbankan Indonesia harus berazaskan pada demokrasi ekonomi dengan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Suyatno (1997 : 1) dilihat dari fungsinya, maka bank mempunyai fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga :

Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit dimana bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, dimana bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber dari penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Sedangkan fungsi *ketiga*, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Sedangkan Suyatno (1997 : 2) mengemukakan bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*Transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan *trust service* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan/pengawasan harta milik).

Menurut Siamat (1999:5) yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan asset non finansial atau asset riil. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skim tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan system pembayaran dan mekanisme transfer dana. Oleh karena itu lembaga keuangan merupakan bagian dari system keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

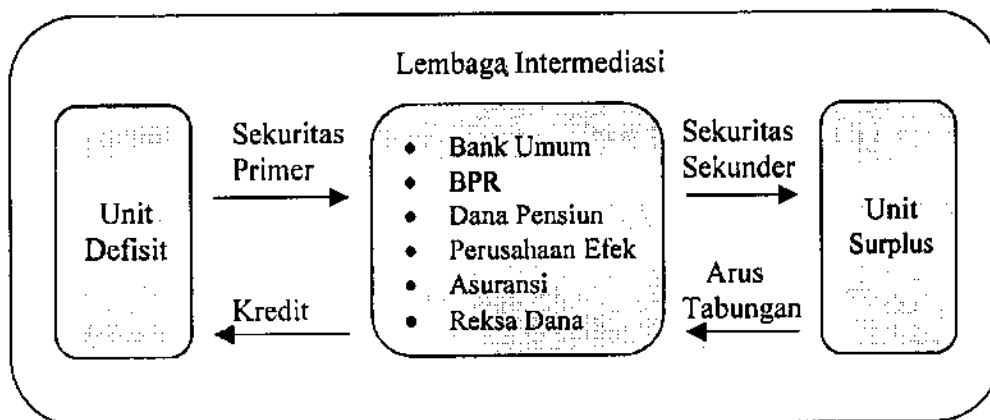
Dilihat dari kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) dan lembaga keuangan non depositori (*non depository financial institution*). Lembaga keuangan depositori menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank. Sedangkan lembaga keuangan non depositori menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, misalnya polis asuransi, program pensiun. Lembaga keuangan bukan bank lainnya seperti lembaga keuangan investasi, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan (*finance company*).

Menurut Siamat (1999: 7) bahwa lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan karena mempunyai peran dalam bidang :

- a. Pengalihan aset (*asset transmutation*), dalam hal ini lembaga keuangan mempunyai aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar”. Bentuk janji tersebut pada dasarnya adalah kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu dan sesuai kesepakatan dengan peminjam dan dana yang digunakan untuk membiayai pinjaman tersebut diperoleh dari simpanan para penabung. Sehingga lembaga keuangan hanyalah berperan mengalihkan kewajibannya kepada nasabah menjadi aset bagi lembaga keuangan.

- b. Likuiditas, dalam hal ini beberapa sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dibeli oleh sektor usaha dan rumah tangga untuk tujuan menjaga likuiditas. Sekuritas sekunder tersebut misalnya dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan menghasilkan tambahan pendapatan.
- c. Relokasi pendapatan, dalam hal ini banyak individu yang menyadari bahwa penghasilan di masa yang akan datang akan semakin berkurang, sehingga merelokasikan pendapatannya dengan membeli sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan misalnya dalam bentuk simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun.
- d. Transaksi, dalam hal ini sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito dapat mempermudah dalam penyelesaian transaksi barang dan jasa, sehingga memudahkan dalam sistem pembayaran.

Gambar 1
Proses Intermediasi Keuangan



Gambar : Proses Intermediasi Keuangan
Sumber : Siamat, (1999, 9)

2.2.4 Penghimpunan Dana Masyarakat

A. Pengertian Simpanan

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank oleh bank dinamakan nasabah bank. Pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, dan pengertian nasabah dibagi menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Usaha bank sangat tergantung pada keberhasilan penghimpunan dana masyarakat karena sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, maka bank harus mampu menyerap dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan pada sektor-sektor yang produktif.

Dalam usaha menggali penghimpunan dana tersebut, maka bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat pada masyarakat sekitarnya dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dana dapat bersumber dari bank sendiri yang merupakan modal

disetor dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Selain itu dana yang berasal dari masyarakat luas umumnya berbentuk simpanan, yang meliputi deposito, giro ataupun tabungan. Khusus bagi BPR penghimpunan dana hanya berupa tabungan dan deposito berjangka.

B. Pengertian Deposito Berjangka

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Bab I pasal 1, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Namun demikian dalam prakteknya apabila diperlukan bank dapat membayar kembali simpanan deposito tersebut sebelum jatuh tempo, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan nasabah penyimpan. Jangka waktu deposito sesuai kebutuhan; satu bulan, 3 bulan, 6 bulan 12 bulan, dan 24 bulan. Tingkat suku bunga deposito telah ditentukan oleh setiap bank untuk masing-masing jangka waktu dan pembayaran bunga kepada penyimpan dilakukan pada saat jatuh tempo dan pencairan deposito. Jenis-jenis produk deposito berjangka yang lazim ditawarkan oleh perbankan di Indonesia antara lain :

a. Deposito Valuta Asing Berjangka

Deposito ini pada beberapa bank umum dapat diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika atau mata uang lainnya yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing Jakarta.

b. Sertifikat Deposito

Pengertian sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau unjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ke tiga. Sertifikat deposito ini terikat pada suatu jangka waktu tertentu, di mana pemegang sertifikat deposito memperoleh imbalan yang biasanya dibayar di muka pada saat membeli sertifikat.

c. Deposit on Call

Adalah simpanan yang tetap berada di bank selama deponan tidak membutuhkannya. Apabila deponan akan mengambil simpanan deponasinya terlebih dahulu harus memberitahukan kepada bank.

d. Deposito Automatic Roll-Over

Adalah deposito yang secara otomatis dapat diperpanjang apabila jangka waktunya sudah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum diuangkan. Berarti uang deponan tidak sempat menganggur tanpa memperoleh bunga.

Menurut Hempel (1991; 102), deposito berjangka adalah: "Time deposit differs from savings deposits primarily because they have a predetermined maturity dates and withdrawals prior to that are subject to interest penalty"

C. Pengertian Giro

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Bab I pasal 1, yang dimaksud

giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam pengertian giro tersebut mengandung tiga hal penting yaitu :

a. Simpanan.

Adalah simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro, rekening koran, dimana dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dengan bank. Besarnya simpanan giro tidak dibatasi namun demikian masing-masing bank mempunyai ketentuan jumlah setoran pertama.

b. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.

Artinya bila setoran dilakukan oleh nasabah pada pagi hari, maka pada sore hari simpanan tersebut dapat ditarik kembali, atau bahkan hanya beberapa jam saja.

c. Cara penarikan.

Cara penarikan yang paling sering digunakan adalah penarikan dengan cek, bilyet giro. Namun demikian dengan batas-batas tertentu penarikan dalam bentuk lain seperti dengan surat perintah lainnya, misalnya pemindahbukuan dapat dilakukan.

Kemudian menurut Donald (1993; 288):

"Demand deposits are fund that can be withdrawn or transfered to a third party at any time without advance notice. Such deposits are kept in a bank by individuals and coporations for transactions purposes, and by the latter also as required balances in connection with credit facilities and operations services".

D. Tabungan

Menurut Nasution (1991: 5-6), pengertian tabungan terdiri dari tiga komponen, yaitu tabungan pemerintah, tabungan dunia usaha, dan tabungan rumahtangga

perorangan. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran rutin. Tabungan dunia usaha merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Tabungan rumah tangga perorangan ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menabung serta tergantung pada pendapatan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Bab I pasal 1, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan yang menonjol dengan giro bahwa walaupun penarikan tabungan dapat ditarik kapan saja namun sarana penarikannya hanya menggunakan warkat/slip penarikan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat perintah pembayaran maupun alat pemindahbukuan.

E. Tingkat Suku Bunga

Menurut Budiono (1985: 2), tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau dapat pula dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Seperti halnya dengan harga barang-barang lain apabila jumlah dana yang ditawarkan kreditur lebih kecil dibandingkan yang diminta debitur, maka tingkat suku bunga cenderung naik, demikian pula sebaliknya.

Pengertian tingkat suku bunga sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu Rupiah sekarang dan satu Rupiah nanti. Ada bermacam macam pengertian tingkat suku bunga, di antaranya adalah tingkat bunga murni. Dalam hal ini

kreditur harus memperhitungkan kemungkinan bahwa debitur tidak membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya atau tidak membayar sama sekali. Adanya resiko tentunya harus diperhitungkan kreditur atau calon kreditur dalam transaksi yang direncanakan. Apabila kreditur merasa yakin bahwa debitur pasti akan membayar tepat pada waktunya segala atas kewajibannya, maka resiko tersebut adalah nol. Tetapi apabila kreditur tidak yakin akan hal tersebut, maka resiko harus diperhitungkan dengan cara meminta barang jaminan dan seringkali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Tambahan atau kenaikan suku bunga tersebut disebut dengan premi resiko. Selanjutnya kepada debitur yang kurang dipercaya atau mereka yang nilai jaminannya rendah kreditur mengenakan premi resiko yang lebih tinggi.

Selain tingkat bunga murni ada pula yang menyebutkan dengan tingkat bunga nominal, adalah tingkat bunga yang telah disepakati kreditur dan debitur. Tingkat bunga nominal ini muncul apabila kreditur memperhitungkan perkiraan laju inflasi ke dalam tingkat bunga pinjaman tersebut maka debitur harus melihat hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Tentu saja perkiraan kreditur mengenai laju inflasi belum tentu sama dengan perkiraan debitur mengenai laju inflasi yang akan terjadi. Dari keadaan ini akan terjadi tawar menawar untuk disepakati. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut dinamakan dengan tingkat bunga nominal.

Sering salah pengertian antara tingkat bunga nominal yang dibandingkan dengan tingkat bunga riil. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal setelah dikurangi dengan laju inflasi yang terjadi pada periode yang sama. Bagi kreditur maupun debitur tingkat bunga riil atau yang diharapkan adalah relevan dalam memutuskan apakah mereka

akan mengadakan transaksi atau tidak. Bagi kreditur tingkat bunga riil merupakan imbalan riil bagi pengorbanannya untuk menyerahkan penggunaan uangnya dalam jangka waktu tertentu. Bagi debitur tingkat bunga riil merupakan beban riil atas penggunaan uang pihak lain. Beban ini biasanya disebut sebagai biaya riil dari capital (real cost of capital) bagi debitur tersebut, terutama mereka sebagai investor di bidang produksi barang dan jasa.

2.2.5 Penyaluran Kredit

A. Pengertian Kredit

Menurut Suyatno (1993: 2) kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) atau dalam bahasa Latin (*creditum*) yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*) oleh karenanya dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan Eric L. Kohler dalam Mulyono (1993: 10) mengemukakan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang dimaksud kredit adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian "hasil keuntungan". Dasar utama dari pengertian kredit tersebut adalah kepercayaan, ini berarti bahwa bank dapat

memberikan kredit kepada masyarakat apabila bank sudah betul-betul percaya bahwa uang yang dipinjamkannya pada suatu waktu tertentu akan kembali.

Sedangkan unsur-unsur kredit menurut Suyatno (1,993:14) adalah sebagai berikut :

- a. *Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. *Waktu*, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk mencrobos hari depan itu, maka masih selalu ada unsur ketidakpastian yang sukar diperhitungkan, dan dari kondisi inilah timbulnya unsur resiko.
- d. *Prestasi*, yaitu suatu obyek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang akan tetapi dapat juga dalam bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek.

Menurut Mulyono (1993: 26 -30) pengelompokan kredit berdasarkan jenisnya, adalah sebagai berikut :

- a. Kredit untuk modal kerja, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya.

- b. Kredit investasi, adalah kredit yang dikeluarkan perbankan untuk membeli barang-barang modal.
- c. Personal loan, adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
- d. Non Cash Loan, adalah kredit yang belum efektif ditarik secara tunai ataupun pemindahbukuan, tetapi di dalamnya terkandung adanya kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, Jenis kredit ini dapat berupa fasilitas bank garansi ataupun fasilitas pembukaan letter of credit,

Menurut Siamat (1999 : 107) kredit dapat digolongkan kedalam beberapa kriteria yaitu berdasarkan jangka waktunya, tujuan penggunaan kredit dan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi :

- a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk pula kredit modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya antara 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk investasi.
- c. Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya di atas 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk membiayai investasi.

Sedangkan dilihat dari tujuan penggunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi :

- a. Kredit komersial (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersial ini meliputi antara lain : kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.
- b. Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya misalnya membeli property (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
- c. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Sinungan (1994: 177) :

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan suatu proyek baru. Ciri dari kredit investasi diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai perencanaan yang terarah dan matang serta waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang,

Sedangkan menurut Siswanto (1995: 183) :

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan proyek baru atau

perluasan proyek yang sudah ada. Pada umumnya sebagian besar kredit investasi dipergunakan untuk mendanai pengadaan tanah, gedung infrastruktur, mesin, peralatan, kendaraan, investasi kantor dan modal kerja awal.

Kalau menurut Suyanto (1993: 29) :

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut Dornbusch (1986: 236) pengertian investasi itu sendiri adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan barang-barang modal. Barang/stock modal (capital stocks) terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal termasuk pula perumahan tempat tinggal dan juga persediaan-persediaan. Sedangkan menurut Mulyono (1993: 27) kredit investasi adalah kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk pembelian barang-barang modal yang tidak habis dalam satu siklus, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali uang kas tersebut memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran.

Menurut William dan Donaldson (1971; 220, 221, 222) berpendapat mengenai modal kerja yang sifatnya jangka pendek adalah:

"Short-term is usually interpreted to mean a few months normally less than 6 and certainly less than 12. Self liquidating indicates that the loan is for purpose that will generate the funds for repayment in the normal course of the projected operations. Loans to support a seasonal build up of inventory and receivables are

generally of this type. The short-term, inherently self-liquidating type of loan, which for case of reference we shall hereafter refer to as "STISL" loans, has several basic attractions as an outlet for commercial bank loan funds. First, the inherently self liquidating aspect means not only that the borrower's need for bank funds is essentially temporary but also that the timing of the need derives from predictable patterns of the business operations. Once these needs are understood, the banker has a solid basis on which to establish sound loan repayment terms "sound" in the sense that the terms fit a predictable pattern of developing, and then abating, need. Second, the fact that STISL loan requests are to meet identifiable, understandable needs permits the banker to make a meaningful evaluation of the risks that the plans of the business will miscarry and that repayment will be jeopardized. Third, lending for needs of short duration also tends to reduce the inherent risk exposure of the bank, since risks and uncertainties tend to increase as the time horizon is extended".

Selain secara self liquidating, kredit modal kerja bisa juga digunakan dengan cara revolving. Untuk mendukung pernyataan tersebut, Claran (1988; 679) menyebutkan :

"Revolving credit are formal contractual obligations in which the bank agrees to provide a stated amount of credit, during a specified future period, usually for a period of from 12 months to three years. Each loan is evidenced by a note that normally has a maturity of 90 days. The amount outstanding may fluctuate up or down as the customer's needs dictate, as long as the total outstanding at anyone time does not exceed the maximum credit. Because of the relatively long time period, revolving credits are supported by signed loan agreements. One normal use of revolving credits is to finance working capital requirements, much as some companies use lines of credit. These more formal arrangements provide greater assurance that the funds will be there when needed and have a longer period of availability"

B. Alokasi Portfolio Kredit

Menurut Johnson (1985 :134-135) mengatakan bahwa :

"Decisions regarding allocation of funds to specific portfolios take into consideration the capacity to handle specific types of loan requests and to conduct loan operations activities in support of loan requests, accounting for loans, and collecting loans. The loan portfolio administrator must consider the specific loan processes and their differences for commercial, consumer, and mortgage loans. Other decisions include identifying the market for specific loans, the loan purposes that will be acceptable risks, personnel capabilities, pricing, funding sources, portfolio liquidation rates, and general and specific profit objectives. These factors will become part of a plan for current and future

years and should be incorporated in a formal loan policy. Numerous factors impact portfolio allocation. For example, a "large" bank in a small community must consider the balance of demand for commercial, consumer, and mortgage loans. The small bank in a small community may set different strategies, concentrating primarily on consumer loans and secondarily on commercial loans and ignoring mortgage lending. The large bank may set geographic, industry, and customer objectives that are totally different from those of a small to medium size bank in a large city. The allocations and strategies depend on available funds, lending expertise, and support systems".

Menurut McCoy (1994 : 278) :

"In commercial loan portfolio, several individual credit exposures often share characteristic that can result in concurrent losses. Excessive concentrations in certain geographical areas, industrial sectors, and loan types present risks that banks should consider in planning their loan portfolio. By diversifying risks according to characteristics of individual industry performance, a more balanced portfolio that is insulated from economic hardships occurring in an industrial or geographic area can be constructed. In addition, an effective credit management system constantly evaluates relevant portfolio characteristics. Early detection of weakening credits through efficient tracking allows for both prompt intervention in problem loans and limitation of new loans in affected industrial or geographic sectors".

Sedangkan menurut Hempel (1983):

"Bank loans finance diverse groups in the economy. Manufacturers, distributors, service firms, farmers, builders, home buyers, commercial real estate developers, consumers, and others all depend on bank credit. The ways in which banks allocate their loanable dollars can strongly influence the economic development of the community and nation. Every bank experiences some loan losses. Whatever the degree of risk taken, loan losses can be minimized through highly professional organization and management of the lending function".

2.2.6 Pengertian Jasa

Menurut Kotler (1996: 6) jasa didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berupa sesuatu yang berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa jenis jasa.

Komponen jasa ini dapat merupakan bagian kecil ataupun bagian utama dari keseluruhan penawaran tersebut. Pada kenyataannya, suatu penawaran dapat bervariasi dari dua kutub ekstrim, yaitu murni berupa barang pada satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya, berdasarkan kriteria ini, penawaran suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu :

1. Produk fisik murni, penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik.
2. Produk fisik dengan jasa pendukung, pada kategori ini penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disenai dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada konsumennya.
3. Hybrid, penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar persinya.
4. Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa tambahan serta barang-barang atas suatu jasa utama bersama-sama dengan jasa tambahan serta barang-barang pendukung.
5. Jasa murni, penawaran hampir seluruhnya berupa jasa.

A. Pemasaran Jasa

Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari keberhasilannya dalam melakukan aktivitas pemasaran. Bidang perbankan yang memasarkan produk-produk berupa jasa perbankan yang tidak belwujud memerlukan pemasaran sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah. Menurut Simorangkir (1992: 37) pemasaran bank adalah penciptaan pelayanan yang pada hakekatnya untuk memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan nasabah, di samping untuk keuntungan perusahaan. Perkembangan inilah yang mendorong bank-bank dituntut untuk meningkatkan kadar profesionalisme didalam melayani nasabah. Seperti yang

diungkapkan oleh Nazir (1990 : 5) bahwa bank dikenal sebagai *total marketing concept* artinya pemasaran bank bukan hanya sekedar *public relations*. dan *personal selling*, akan tetapi juga tutur kata yang lemah lembut dari operator telepon, pelayanan yang baik di *front desk*, interior gedung yang baik serta sistem yang diterapkan di bank itu.

Oleh karena itu ada dua pokok penting yang terkait dalam marketing bank yakni faktor kreasi (*creation*) dan pemberian pelayanan (*deleverly*). Dua faktor tersebut ternyata saling menunjang satu dengan yang lain. Suatu kreasi yang baik sekalipun kalau tidak diikuti oleh pemberian layanan yang baik, maka hasilnya mungkin akan kurang baik. Pemberian layanan yang baik namun dengan produk atau jasa perbankan yang kurang memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, juga merupakan marketing yang buruk. Jelaslah bahwa aspek marketing bank merupakan proses yang aktif, dan menuntut seluruh jajaran personalia bank untuk melibatkan diri secara utuh.

B. Ciri-Ciri Jasa Bank.

Beberapa sifat dari jasa perbankan mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan jasa yang dimiliki oleh industri lainnya. Menurut Richard (1986 : 120) jasa bank itu mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Intangibility

Sifat dari jasa yang tidak tampak ini mengharuskan pihak bank pandai-pandai dalam menyampaikan jasanya kepada nasabah. Apa yang ditawarkan oleh pelayanan jasa perbankan harus memberikan harapan kepada nasabahnya berupa kepastian akan produk yang akan ditawarkan pada nasabah, siapa-siapa yang membutuhkan dan yang memberikan jasa perbankan tersebut serta kepastian bagaimana sebaiknya

jasa perbankan itu diberikan.

2. *Lack of Identity*

Dihadapan masyarakat jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank tampak sama, sehingga bank harus mencari cara agar jasa yang ditawarkan kepada nasabah mempunyai identitas tersendiri yang berbeda dengan jasa bank lainnya, walaupun produk jasa yang ditawarkan adalah sama. Perbedaan itu bisa pada pelayanan yang khas, promosi, periklanan, pengemasan produk atau penentuan segmen pasarnya dan sebagainya.

3. *In-built inertia*

Sekali seorang nasabah berhubungan dengan bank maka tidak mudah membujuknya untuk pindah ke pihak lain, kecuali bila terdapat beberapa alasan yang kuat seperti layanan tidak memuaskan, fasilitasnya tidak lengkap, bank terkena isu krisis atau jaraknya sulit dicapai. Sehingga penting bagi bank untuk membangun nasabah sejak dari awal.

4. *Wide range of need*

Bank harus menawarkan banyak model pelayanan jasanya, agar dapat memahami kebutuhan nasabahnya yang beraneka ragam. Untuk keperluan tersebut bank harus bisa menyesuaikan antara kebutuhan kedua kebutuhan tersebut bila telah teridentifikasi dan ditangani oleh seorang spesialis di bidangnya. Sehingga penting sekali bagi bank tersebut untuk lebih memahami dan mendalami jasa perbankan.

5. *Geographic dispersion*

Adanya hambatan geografis, maka bank harus membangun jaringan cabang di semua lokasi, agar penyediaan jasa bank dapat lebih merata, baik untuk kebutuhan lokal maupun nasional atau lebih jauh lagi, yaitu internasional. Bank harus berusaha

agar jasa-jasa dan promosinya sedapat mungkin bisa diterima secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. *Wide direct/indirect competition*

Bank mengalami tantangan yang sangat berat dalam berkompetisi, yaitu dengan adanya persaingan yang sangat ketat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jasa-jasa yang ditawarkan bank. Pesaing langsung bagi bank adalah dari bank -bank lainnya, sedangkan yang tidak langsung berasal dari lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian dan masih banyak lainnya.

7. *Growth must be balanced with risk*

Pada saat bank menjual kreditnya kepada debitur, mK pada saat itu pula berarti bank membeli resiko, atau dengan kata lain semakin tidak pasti hasil yang diperoleh suatu bank, maka akan semakin besar resiko yang diterima oleh bank tersebut.

2.2.7 **Tingkat Kesehatan Bank**

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, ditetapkan bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Penilaian tingkat kesehatan BPR pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Penilaian dengan pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan menilai terhadap 5 (lima) faktor yaitu faktor permodalan,

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Penilaian tingkat kesehatan bank pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor, kemudian diberikan bobot masing-masing komponen sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan bank. Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan system kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 (nol) sampai dengan '00 (seratus). Kemudian hasil penilaian kuantifikasi dari komponen-komponen tersebut akan dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.

Berdasarkan penilaian terhadap faktor dan komponen serta aspek-aspek lainnya tersebut di atas, kemudian ditetapkan kedalam 4 (empat) predikat tingkat kesehatan bank yaitu : *Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat* dan *Tidak Sehat*. Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat, cukup sehat atau kurang sehat dapat diturunkan menjadi predikat Tidak Sehat apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
- b. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. "Window Dressing" dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;

- d. Prektek “ Bank dalam Bank” atau melakukan usaha bank di luar pemnukuan bank;
- e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga; atau
- f. Prektek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan kesehatan bank.

A. Pelaksanaan Penilaian

1. Faktor Permodalan

Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penilaian terhadap Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rasio sebesar 8% diberikan predikat “Sehat” dengan nilai kredit 81 (delapan puluh satu), dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan rasio 8%, diberikan nilai kredit tambahan 1 (satu) hingga maksimum 100 (seratus).
- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberikan predikat “Kurang Sehat” dengan nilai kredit 65 (enam puluh lima) dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 (satu) dengan minimum 0 (nol).

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

- a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap Aktiva Produktif (AP);

- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) oleh bank.

Rasio APYD terhadap AP ditetapkan 22,5% atau lebih diberikan nilai kredit 0 (nol), dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100 (seratus). Kemudian rasio PPAP terhadap PPAPWD sebesar 0% diberi nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 (nol) nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100 (seratus).

3. Faktor Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, yang dinilai dengan menggunakan daftar pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan yang terdiri atas 10 pertanyaan manajemen umum dan 15 pertanyaan manajemen risiko. Skala penilaian untuk setiap pertanyaan ditetapkan dengan skala antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat), dengan kriteria :

- a. nilai 0 (nol) mencerminkan kondisi yang lemah;
- b. nilai 1,2 dan 3 mencerminkan kondisi antara;
- c. nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

4. Faktor Rentabilitas

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

- a. Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama;
- b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan

Operasional dalam periode yang sama.

Rasio pertama sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100 (seratus). Sedangkan rasio kedua ditetapkan untuk sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100 (seratus).

5. Faktor Likuiditas

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :

- a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar;
- b. Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh bank.

Alat likuid meliputi kas dan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi tabungan bank lain pada bank, sedangkan hutang lancar meliputi kewajiban segera yang harus dibayar ditambah tabungan dan deposito pihak ketiga.

Kemudian Dana Yang Diterima meliputi : deposito dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank lain kurang dari 3 (tiga) bulan, deposito dan pinjaman dari bank lain lebih dari 3 (tiga) bulan ditambah dengan Modal Inti dan Modal Pinjaman.

Rasio pertama ditetapkan untuk sebesar 0% diberikan nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan maksimum 100 (seratus). Sedangkan rasio kedua ditetapkan sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115%, nilai kredit ditambah 4 (empat) dengan maksimum 100 (seratus).

6. Pelaksanaan Ketentuan Lain

Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank adalah pelanggaran batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran terhadap modal bank, dan akan mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan bank dengan perhitungan :

- a. untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5 (lima); dan
- b. untuk setiap 1% pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10 (sepuluh).

B. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Atas dasar nilai kredit gabungan setelah dikurangi dengan nilai kredit pelanggaran BMPK akan diperoleh hasil akhir penilaian tingkat kesehatan, yang ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

- a. nilai kredit 81 sampai 100 diberi predikat Sehat;
- b. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat;
- c. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat; dan
- d. nilai kredit 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang dalam melakukan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian dilihat dari jenis dan usahanya bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah BPR-BPR yang berada di Kabupaten Sidoarjo, dimana fungsi utama BPR adalah sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dengan demikian maka BPR berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara nasabah kreditur atau sektor yang berkelebihan dana (surplus) dengan nasabah debitur atau sektor yang kekurangan dana (minus). Dalam melaksanakan fungsinya pada dasarnya BPR mempunyai dua fungsi pokok, yaitu pertama menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau simpanan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dan Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Di wilayah Kabupaten Sidoarjo saat ini terdapat 18 kecamatan. Pada akhir Juni 2002 di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat 65 kantor BPR yang masih beroperasi. Penyebaran kantor BPR di Kabupaten Sidoarjo tidak merata, dimana dari seluruh kecamatan yang ada terdapat 5 kecamatan yang sampai saat ini belum terdapat kantor BPR. Sementara di beberapa kecamatan lainnya terdapat kantor BPR yang relatif banyak dan cenderung terkonsentrasi.

Berdasarkan buku Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka tahun 2001, diketahui bahwa angka realisasi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2001 dari seluruh kecamatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok kecamatan. Perhitungan PBB didasarkan pada perkembangan harga tanah dan bangunan di suatu wilayah kecamatan, sedangkan harga tanah dan bangunan merupakan cerminan dari kemakmuran atau potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah kecamatan, maka dari 18 kecamatan yang ada dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, kelompok kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan kelompok kecamatan dengan potensi ekonomi rendah.

Dari masing-masing kelompok kecamatan ditetapkan 5 (lima) BPR sebagai sampel. Kriteria BPR yang dijadikan sebagai sampel adalah BPR yang mempunyai kinerja keuangan "Sehat" berdasarkan penilaian tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2003 yang dilakukan oleh Bank Indonesia Surabaya, sehingga dari ketiga kelompok kecamatan tersebut dapat ditetapkan sebanyak 15 BPR sampel. Tidak semua BPR yang berada di wilayah kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi memiliki kinerja keuangan "Sehat", demikian pula sebaliknya, tidak semua BPR yang berada di wilayah kecamatan dengan

potensi ekonomi rendah kinerja keuangannya akan “Tidak Sehat”. Di sisi lain, walaupun BPR-BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, masing-masing memiliki kinerja keuangan “Sehat”, belum tentu kemampuan penghimpunan dana dan penyaluran kreditnya akan sama satu sama lainnya.

Untuk mengetahui perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana dan penyaluran kredit dari BPR-BPR sampel yang berada di tiga kelompok kecamatan yaitu kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan kecamatan dengan potensi ekonomi rendah, diperlukan suatu analisis dengan model analisis uji statistik Analysis Of Variance (ANOVA) atau F test. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan BPR-BPR dalam melakukan fungsi intermediasi, dilakukan dengan mengukur tingkat korelasi antara penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah yang menggunakan model analisis regresi. Model analisis ANOVA dan model analisis Regresi digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan yaitu :

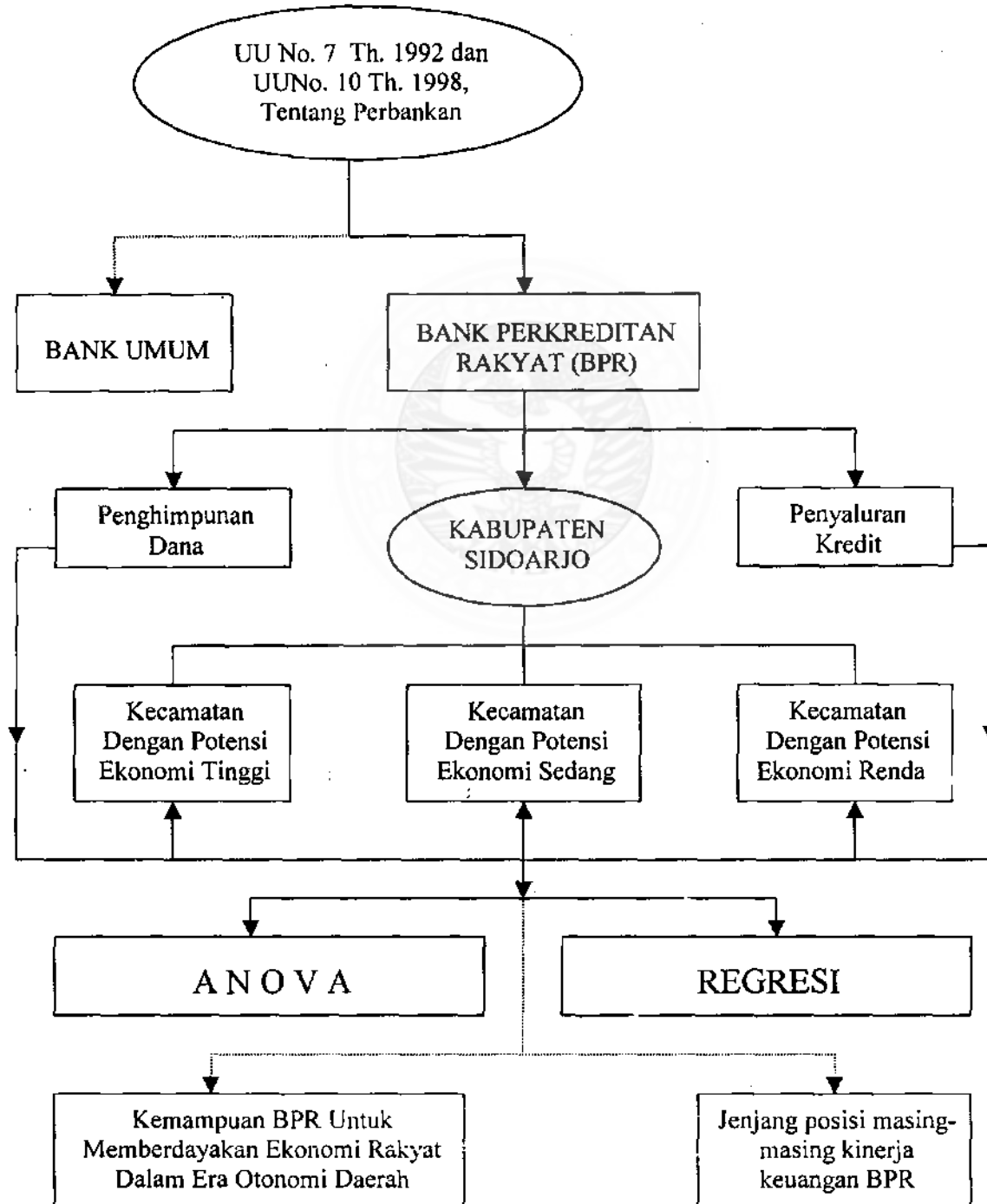
- a. Ada perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana oleh BPR-BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah;
- b. Ada perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit oleh BPR-BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah;
- c. Diduga terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit, yang dilakukan oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana kepada pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya termasuk didalamnya bidang keuangan daerah, untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, maka untuk mengetahui kemampuan BPR-BPR sampel tersebut dalam memberdayakan ekonomi rakyat dalam era Otonomi Daerah, perlu dilakukan analisis terhadap wilayah penyaluran kreditnya yang terbagi kedalam empat wilayah penyaluran yaitu; Kecamatan setempat dengan lokasi kantor BPR, Kecamatan lain dalam Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan lain di luar Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan wilayah Kota Surabaya (Ibu Kota Provinsi).

Kemudian untuk mengetahui jenjang posisi kinerja keuangan masing-masing BPR, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran kredit serta kinerja keuangan berdasarkan faktor CAMEL, dilakukan analisis perbandingan kinerja dengan ranking tabel dua jalan. Dalam analisis ini masing-masing faktor CAMEL dan jumlah penghimpunan dana serta penyaluran kredit setiap BPR diurutkan dari ranking yang terbaik sampai dengan ranking terendah, kemudian diberikan skor dari nilai skor 15 sampai dengan nilai skor 1. Nilai skor dari seluruh faktor CAMEL dan jumlah penghimpunan dana serta penyaluran kredit dijumlahkan kemudian dibuat peringkat jumlah nilai skor mulai jumlah yang terbesar sampai dengan jumlah terkecil dan dihitung nilai skor rata-rata. Dengan membandingkan jumlah nilai skor masing-masing BPR terhadap rata-rata skor, dapat diketahui BPR yang kinerja keuangannya berada di

atas rata-rata ranking dan BPR yang kinerja keuangannya berada di bawah rata-rata ranking.

Adapun kerangka konseptual penelitian secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut :



3.2. Hipotesis

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka seperti diuraikan sebelumnya yang merupakan pijakan dari penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah :

- a. Ada perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana menurut wilayah penyerapannya pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di Kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan kurang.
- b. Ada perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit menurut wilayah penyalurannya pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di Kecamatan dengan potensi ekonomi lebih, sedang dan kurang.
- c. Diduga terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit, yang dilakukan oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah.

3.3. Model Analisis

3.3.1 Analysis Of Variance (ANOVA)

Untuk membuktikan dua hipotesis pertama yang diajukan, maka dalam penelitian ini digunakan model analisis uji statistik Analysis of Variance (ANOVA) atau F test. Uji statistik ini digunakan dengan satu alasan bahwa klasifikasi datanya rasio dan yang akan dibandingkan adalah lebih dari dua sampel penelitian dimana obyeknya BPR dengan kinerja sehat yang berada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya mengenai penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Dalam hal ini jumlah penghimpunan dana masyarakat dan kredit yang disalurkan kepada debitur diukur

dengan satuan uang, sehingga bila dilihat dari jenis datanya termasuk dalam jenis data yang kontinu.

Di samping itu obyek penelitian lainnya juga meliputi penilaian jenjang posisi kinerja keuangan masing-masing BPR yang tercermin dari kemampuan penghimpunan dana dan penyaluran kredit serta hasil penilaian tingkat kesehatan BPR-BPR di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari jumlah faktor CAMEL, sesuai dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bulan Juni 2002 yang dilakukan oleh Bank Indonesia Surabaya.

Selain alasan seperti disebutkan di atas, alasan lain adalah ketiga sampel pengamatan tersebut merupakan variabel bebas, sehingga antara satu dengan lainnya saling tidak tergantung. Sedangkan jumlah pengamatan untuk tiap-tiap sampel menggunakan data posisi (cross section) bulan Juni 2002. Dengan jumlah kasus untuk tiap-tiap sampel dalam penelitian ini 5 BPR dengan kinerja sehat pada masing-masing kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan alasan lainnya adalah ketiganya merupakan variabel bebas, klasifikasi datanya rasio, dan jenisnya data kontinu secara cross section pada bulan Juni 2002. Model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis distribusi penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit adalah *Model Analysis of Variance (ANOVA)*.

KASUS	SAMP EL			JUMLAH
	X ₁	X ₂	X ₃	
A
B
C
D
E
X	X ₁	X ₂	X ₃	

$$S^2 I = \frac{I \sum (X_j - X)^2}{(j - 1)}$$

$$S^2 II = \frac{\sum (X_{ij} - X_j)^2}{J(i - 1)}$$

$$F_{t_0} = \frac{S^2 I}{S^2 II}$$

Keterangan :

- i : Jumlah kasus pengamatan atau jumlah baris/BPR
- j : Jumlah sampel pengamatan atau jumlah kolom (Kecamatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah).
- $S^2 I$: Variance pembilang
- $S^2 II$: Variance penyebut
- F_{t_0} : F test hitungan atau observasi
- X : rata-rata nilai total seluruh sampel pengamatan Penghimpunan dana, dan Penyaluran kredit.
- X_j : rata-rata nilai tiap sampel pengamatan atau rata-rata tiap-tiap kolom
- X_1 : rata-rata nilai penghimpunan dana dan penyaluran kredit oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi.
- X_2 : rata-rata nilai penghimpunan dana dan penyaluran kredit oleh BPR yang

berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang.

X_3 : rata-rata nilai penghimpunan dana dan penyaluran kredit oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah.

X_{ij} : nilai observasi pada baris ke i kolom ke j .

Model Analisis Of Varian (ANOVA) digunakan untuk menguji hipotesis tersebut di atas. Namun model tersebut hanya mampu menjelaskan ada tidaknya perbedaan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, atau hanya mampu menjawab hipotesis yang diajukan ditolak atau tak ditolak saja. Sedangkan penyebab ditolak atau tak ditolak hipotesis tersebut secara statistik masih harus dilengkapi dengan analisis kualitatif lebih mendalam yang berguna untuk mempertajam analisisnya.

3.3.2 Analisis Regresi (Regression Analysis)

Model analisis regresi digunakan untuk membuktikan hipotesis yang ketiga yaitu diduga terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit, yang dilakukan oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah. Penggunaan model analisis regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara jumlah penghimpunan dana masyarakat terhadap jumlah kredit yang mampu disalurkan oleh BPR dengan kinerja sehat baik yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah. Korelasi yang dihasilkan mencerminkan kemampuan BPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dalam model regresi ini hanya menggunakan 2 (dua) variabel yaitu dana masyarakat dan kredit yang diberikan, dimana kredit sebagai variabel tidak bebas (X_2) dan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebagai variabel bebas (X_1).

Adapun spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$X_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e_i$$

Keterangan :

X_2 = Kredit yang diberikan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir sejak Juni 2001 sampai dengan Juni 2002.

X_1 = Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BPR dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, selama 13 (tiga belas) terakhir sejak Juni 2001 sampai dengan Juni 2002.

β_0, β_1 = Parameter koefisien variabel dan besarnya konstanta.

e_i = Variabel pengganggu di luar model

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel dimana keseluruhannya merupakan variabel bebas. Variabel tersebut merupakan jumlah penghimpunan dana dan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR-BPR dengan kinerja sehat baik yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan kecamatan dengan potensi ekonomi rendah. Secara terinci variabel-variabel dimaksud adalah :

- 4.1.1 Jumlah penghimpunan dana dan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi (X_1);
- 4.1.2 Jumlah penghimpunan dana dan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang. (X_2);
- 4.1.3 Jumlah penghimpunan dana dan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah (X_3);

Selanjutnya variabel-variabel tersebut di atas akan digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga dengan menggunakan model statistik Analysis Of Variance (ANOVA) atau F test dan analisis Regresi.

4.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas pengetahuan terhadap masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan secara operasional yang dapat pula diartikan sebagai

ruang lingkup analisis.

- 4.2.1 Jumlah penghimpunan dana oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi adalah : Jumlah dana masyarakat yang meliputi deposito berjangka dan tabungan dalam ribuan rupiah yang berhasil dihimpun oleh lima BPR dengan kategori sehat yang berlokasi di kecamatan dengan tingkat realisasi PBB tahun 2001 mencapai di atas Rp 1.994 juta.
- 4.2.2 Jumlah penghimpunan dana oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang adalah : Jumlah dana masyarakat yang meliputi deposito berjangka dan tabungan dalam ribuan rupiah yang berhasil dihimpun oleh lima BPR dengan kategori sehat yang berlokasi di kecamatan dengan tingkat realisasi PBB tahun 2001 mencapai sebesar Rp 1.093 juta sampai dengan Rp 1.994 juta.
- 4.2.3 Jumlah penghimpunan dana oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah adalah : Jumlah dana masyarakat yang meliputi deposito berjangka dan tabungan dalam ribuan rupiah yang berhasil dihimpun oleh lima BPR dengan kategori sehat yang berlokasi di kecamatan dengan tingkat realisasi PBB tahun 2001 di bawah Rp 1.093 juta.
- 4.2.4 Jumlah penyaluran kredit oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi adalah : Jumlah kredit baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif dengan jenis investasi modal kerja maupun konsumsi dan dengan

jangka waktu pendek, menengah dan panjang dalam ribuan rupiah, yang disalurkan oleh lima BPR sehat yang berlokasi di kecamatan dengan tingkat realisasi PBB mencapai di atas Rp 1.994 juta.

4.2.5 Jumlah penyaluran kredit oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang adalah : Jumlah kredit baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif dengan jenis investasi modal kerja maupun konsumsi dan dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang dalam ribuan rupiah, yang disalurkan oleh lima BPR sehat yang berlokasi di kecamatan dengan dengan tingkat realisasi PBB tahun 2001 mencapai sebesar Rp 1.093 juta sampai dengan Rp 1.994 juta.

4.2.6 Jumlah penyaluran kredit oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah adalah : Jumlah kredit baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif dengan jenis investasi modal kerja maupun konsumsi dan dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang dalam ribuan rupiah, yang disalurkan oleh lima BPR sehat yang berlokasi di kecamatan dengan tingkat realisasi PBB tahun 2001 di bawah Rp 1.093 juta.

Kinerja kelima belas sampel BPR tersebut berdasarkan penilaian Bank Indonesia Surabaya pada saat penelitian berlangsung, yaitu posisi enam bulan terakhir sampai dengan Juni 2002 ditetapkan dalam kategori "SEHAT".

4.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah kontinum dengan klasifikasi data rasio. Dilihat dari periode waktunya merupakan data cross section posisi bulan Juni 2002 dari lima belas BPR yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten

Sidoarjo. Keseluruhan data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua merupakan data primer yang diperoleh melalui questioner. Dalam questioner juga meliputi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang relevan sesuai dengan kepentingan analisis dalam penelitian ini.

Selain sumber data primer juga digunakan data sekunder untuk melengkapi dan lebih mempertajam analisis dalam penelitian ini. Sumber data sekunder antara lain diperoleh dari buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kantor Bank Indonesia Surabaya dari berbagai penerbitan dan buku Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

4.4. Prosedur Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan mengelompokkan BPR-BPR ke dalam tiga kategori kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu kecamatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, kecamatan yang memiliki potensi ekonomi sedang dan kecamatan yang memiliki potensi ekonomi rendah. Kriteria kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah didasarkan pada peringkat nilai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2001 untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun kriteria kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 4.4.1 Kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang berhasil menarik PBB tahun 2001 dengan realisasi mencapai diatas Rp 1.994 juta, meliputi kecamatan Waru, Taman, Gedangan dan Kecamatan Sedati.
- 4.4.2 Kecamatan dengan potensi ekonomi sedang, adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang berhasil menarik PBB tahun 2001 dengan realisasi sebesar Rp 1.093 juta

sampai dengan Rp 1.994 juta, meliputi kecamatan Sidoarjo, Buduran, Tarik dan kecamatan Krian.

4.4.3 Kecamatan dengan potensi ekonomi rendah, adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang tingkat realisasi penarikan PBB-nya di bawah sebesar Rp 1.093 juta, meliputi kecamatan Candi, Wonoayu, Tanggulangin, Porong, Sukodono, Balongbendo, Tulangan, Krembung, Prambon dan kecamatan Jabon.

Sedangkan kriteria BPR dengan kinerja sehat, adalah BPR yang berada di seluruh kecamatan di Kabupateb Sidoarjo yang memiliki tingkat kesehatan “Sehat” berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Surabaya selama enam bulan terakhir sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2002. Langkah selanjutnya memilih lima belas BPR dari BPR-BPR yang berada di tiga kategori kecamatan tersebut masing-masing lima BPR, yang mempunyai kinerja keuangan dengan predikat “SEHAT” sesuai dengan hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Surabaya selama enam bulan terakhir. Kemudian memberikan questioner kepada lima belas BPR sampel yang mewakili dari tiga kategori kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Dari lima belas BPR sampel tersebut kemudian dimintakan data mengenai jumlah penghimpunan dana dan penyaluran kredit menurut wilayah kecamatan operasionalnya baik di kabupaten yang sama inapun di kabupaten lain yang terdiri dari :

- a. Kecamatan setempat dengan BPR
- b. Kematan lain dalam kabupaten yang sama
- c. Kematan lain di kabupaten yang berbeda.
- d. Wilayah Kota Surabaya (Ibu Kota Provinsi).

Pengelompokan menjadi empat wilayah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh

pengelompokan yang lebih mendekati dengan wilayah operasi BPR untuk menunjang pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

4.5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah perbankan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka. Selain itu juga mencari literature-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta dapat digunakan sebagai acuan untuk pengujian hipotesis dan model analisis.

Langkah selanjutnya mencari data primer yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui questioner yang diberikan kepada lima belas BPR di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Data primer yang digunakan untuk menguji hipotesis merupakan data cross section posisi bulan Juni 2002 dari lima belas BPR di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan BPR sampel.

Langkah selanjutnya mencari pula data sekunder yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu data-data dalam, buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kantor Bank Indonesia Surabaya dari berbagai penerbitan dan buku Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam dalam analisis penelitian ini.

4.6. Teknik Analisis

4.6.1 Model Analysis Of variance (ANOVA).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Analysis Of Variance (ANOVA). Dalam penghitungannya masing-masing variabel pada tiap-tiap

sektor dicari terlebih dahulu rata-rata hitungnya, sehingga diperoleh tiga rata-rata hitung. Selanjutnya dari ketiga rata-rata hitung tersebut dicari pula rata-rata hitung totalnya, kemudian dicari variance-nya yang merupakan standard deviasi yang dikuadratkan sehingga menghasilkan suatu nilai yang dinamakan variance pembilang.

Langkah selanjutnya, menjumlahkankan variance-variance pada masing-masing sektor, sehingga menghasilkan suatu jumlah variance penyebutnya. Dengan membandingkan antara variance pembilang dengan variance penyebut akan menghasilkan F test observasi atau F test hitung (F_{to}). Kemudian nilai F test observasi akan dibandingkan dengan F test tabel (F_{tt}) dengan tingkat kebebasan tertentu. Apabila F test observasi lebih kecil atau sama dengan F test tabel ($F_{to} \leq F_{tt}$), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Sebaliknya apabila F test observasi lebih besar dari F test tabel ($F_{to} > F_{tt}$), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tak ditolak. Ditolak maupun tak ditolak hipotesis yang diajukan akan dilihat pula sejauh mana tingkat kebermaknaannya. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini 5 % atau 1 %, dengan demikian maka tingkat kebenaran uji statistik berkisar antara 95 % sampai dengan 99%.

Penghitungan dalam model ANOVA dilakukan dengan menggunakan komputer program microstat. Hal ini dimaksudkan supaya hasil perhitungan yang dihasilkan akan lebih akurat. Hasil uji statistik dari model tersebut hanya mampu menjawab hipotesis ada perbedaan atau tidak ada perbedaan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, namun belum mampu menjawab sebab-sebab adanya perbedaan atau tidak ada perbedaan tersebut. Untuk itu maka diperlukan analisis kualitatif untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini.

4.6.2 Analisis Regresi

Agar supaya hasil perhitungan dapat dilakukan secara akurat, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program komputer berupa Microstat. Kemudian dari print out yang dihasilkan akan dilakukan analisis mengenai signifikan atau tidaknya masing-masing variabel bebas baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dilakukan dengan uji t, sedangkan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas dilakukan dengan uji f. Kemudian juga akan dilakukan pengujian goodness of fit digunakan untuk melihat besarnya kontribusi dari semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebasnya. Adapun langkah-langkah pengujian dengan uji t adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$, Yang berarti bahwa variabel X_1 tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel X_2 .

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, Yang berarti bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap variabel X_2 .

2. Uji t dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

Keterangan :

t = Nilai t

β_i = Nilai koefisien regresi

S_{β_i} = Standard deviasi dari koefisien regresi

3. Setelah masing-masing variabel dilakukan pengujian, maka langkah selanjutnya menentukan t-tabel dengan tingkat signifikansi 5 % ($\alpha = 5\%$). Rumus dari t-tabel adalah $= (\alpha/2, N-k-1)$.

Keterangan :

α = tingkat signifikansi

N = banyaknya observasi

k = banyaknya variabel bebas (independen)

Langkah selanjutnya menentukan kriteria untuk uji t sebagai berikut :

- a. Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka berarti signifikan, yaitu secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak.
 - b. Apabila $t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka berarti tidak signifikan, yaitu secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima.
4. Langkah-langkah pengujian goodness of fit, adalah dengan melihat koefisien determinasi (R^2) dimana koefisien menunjukkan prosentase variasi total dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas, dimana besarnya R-Squared adalah terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Daerah Penelitian

5.1.1 Kondisi Geografis Dan Administrasi Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang letaknya cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Madya Surabaya yang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Timur. Letak geografis Kabupaten Sidoarjo berada pada $112,5^{\circ}$ sampai dengan $112,9^{\circ}$ bujur timur dan $7,3^{\circ}$ sampai dengan $7,5^{\circ}$ lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, di sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Dilihat dari letak ketinggian wilayah dari permukaan laut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu daerah pantai yang berada di sebelah timur dengan ketinggian 0 s/d 3 meter di atas permukaan laut meliputi 29,99 % wilayah. Kemudian di bagian tengah dengan ketinggian antara 3 s/d 10 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 40,81% dan di bagian barat dengan ketinggian 10 s/d 13 meter di atas permukaan laut mencapai luas wilayah 29,20%.

Secara administrasi Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan dan 325 desa serta 28 kelurahan. Luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo mencapai 634,39 Km² dan luas rata-rata per kecamatan mencapai 35,24 Km². Kecamatan dengan wilayah terluas tidak secara otomatis menjadi kecamatan yang

memiliki desa dan kelurahan terbanyak, dimana kecamatan Jabon dengan wilayah terluas yaitu 62,25 Km² hanya memiliki 15 desa. Sedangkan kecamatan Prambon dengan luas wilayah yang lebih kecil yaitu 31,39 Km² memiliki 20 desa. Selengkapnya jumlah desa, kelurahan dan luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Luas wilayah, jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	55,5414	13	11
2.	Buduran	36,6019	15	-
3.	Candi	37,7720	24	-
4.	Porong	27,7474	13	6
5.	Krembung	26,5410	19	-
6.	Tulangan	29,6025	22	-
7.	Tanggulangin	30,0161	19	-
8.	Jabon	62,2531	15	-
9.	Krian	30,0185	19	3
10.	Balongbendo	28,6375	20	-
11.	Wonoayu	32,6725	23	-
12.	Tarik	32,4972	20	-
13.	Prambon	31,3914	20	-
14.	Taman	28,8253	16	8
15.	Waru	27,7224	17	-
16.	Gedangan	23,0971	15	-
17.	Sedati	61,9157	16	-
18.	Sukodono	31,5323	19	-
	Jumlah	634,3853	325	28

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001.

5.1.2 Jumlah dan Angka Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, 1990 dan 2000 jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tercatat masing-masing sebesar 854.180 jiwa, 1.167.467 jiwa dan 1.563.015 jiwa. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup

variatif, dimana pada kurun waktu 1980 – 1990 pertumbuhan pertahun mencapai 3,06% dan pada kurun waktu 1990 – 2000 pertumbuhan pertahun mencapai 2,82%. Sementara itu rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun untuk Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 1980 – 1990 hanya tercatat 0,95% dan pada kurun waktu 1990 – 2000 menurun menjadi sebesar 0,52%.

Tabel 5.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2001

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Th. 2001	Kepadatan Penduduk
1.	Sidoarjo	55,5414	124.696	2.245
2.	Buduran	36,6019	51.325	1.402
3.	Candi	37,7720	68.201	1.806
4.	Porong	27,7474	60.292	2.173
5.	Kremlung	26,5410	51.097	1.925
6.	Tulangan	29,6025	63.860	2.157
7.	Tanggulangin	30,0161	63.396	2.112
8.	Jabon	62,2531	43.093	692
9.	Krian	30,0185	79.757	2.657
10.	Balombendo	28,6375	56.400	1.969
11.	Wonoayu	32,6725	59.063	1.808
12.	Tarik	32,4972	52.891	1.628
13.	Prambon	31,3914	57.091	1.819
14.	Taman	28,8253	130.316	4.521
15.	Waru	27,7224	146.079	5.269
16.	Gedangan	23,0971	71.185	3.082
17.	Sedati	61,9157	58.142	939
18.	Sukodono	31,5323	56.227	1.783
	Jumlah	634,3853	1.293.111	2.038

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001

Dari Tabel 5.2 di atas, tampak bahwa Kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 146.079 jiwa diikuti dengan Kecamatan Taman sebesar 130.316 jiwa yang melebihi Kecamatan Sidoarjo yang hanya berpenduduk sebesar 124.696 jiwa,

sementara kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Jabon dengan 43.093 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Waru dan Taman erat kaitannya dengan letaknya yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan Kotamadya Surabaya.

Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman merupakan dua kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu masing-masing 5.269 dan 4.521 jiwa/ Km², jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo yang hanya sebesar 2.038 jiwa/ Km². Kecamatan Jabon yang memiliki wilayah terluas yaitu 62,2531 Km² memiliki tingkat kepadatan penduduk terkecil yaitu 692 jiwa. Sementara Kecamatan Gedangan yang memiliki luas wilayah terkecil 23,0971 Km² memiliki tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi yaitu 3.082 jiwa/ Km².

5.1.2 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo digunakan indikator pertumbuhan atau kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada beberapa tahun terakhir yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perekonomian Kabupaten Sidoarjo dalam satu tahun, baik barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah daerah maupun swasta dalam negeri maupun luar negeri. PDRB biasanya dihitung dengan dasar harga pasar/harga berlaku (current price), tetapi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi PDRB menurut harga berlaku tidak dapat digunakan, sebab didalamnya masih terdapat unsur inflasi atau kenaikan tingkat harga. Agar dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB harga berlaku

harus dijadikan harga konstan menurut tahun dasar tertentu agar unsure inflasinya dapat dikeluarkan. Adapun pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo dari tahun 1996 – 2000 berdasarkan harga pasar dan harga konstan dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo
Tahun 1996 – 2000 (Dalam Jutaan Rp)

Tahun	PDRB Menurut Harga Pasar	Pertumbuhan (%)	PDRB menurut Harga Konstan	Pertumbuhan (%)
1996	4.895.642,14	-	4.149.114,79	-
1997	5.781.614,36	18,10	4.357.400,38	5,02
1998	8.348.791,44	44,40	3.663.825,74	-15,92
1999	9.548.538,28	14,37	3.726.746,35	1,72
2000 *	10.707.549,52	12,14	3.840.989,26	3,07
Rata-rata	-	22,25	-	-1,53

Keterangan : *) Angka sementara

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001

Pertumbuhan PDRB menurut harga konstan 1993 tertinggi terjadi pada tahun 1997 yaitu 5,02% dimana pada periode tersebut baru merupakan tahun awal mulai terjadinya krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan. Sementara pada tahun 1998 yang merupakan tahun kedua terjadinya krisis ekonomi PDRB mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan menembus angka minus yaitu (-15,92%), mengingat pada periode yang sama juga terjadi gejolak inflasi yang sangat tinggi. Namun demikian pada tahun 1999 dan 2000 secara bertahap perekonomian Kabupaten Sidoarjo telah tumbuh walaupun masih relatif kecil yaitu masing-masing 1,72 % dan 3,07%

Apabila dilihat berdasarkan sektor perekonomian, maka tampak sektor-sektor yang memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB sebagaimana terlihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1996 – 2000 (Dalam Persentase)

No.	Sektor/Sub Sektor	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1.	Pertanian	4,61	4,68	6,10	5,52	5,43	5,27
	- Tanaman Bahan Makanan	1,06	1,03	1,26	1,27	1,22	
	- Tanaman Perkebunan	0,85	0,83	1,08	0,76	0,73	
	- Peternakan	0,46	0,75	0,82	0,81	0,82	
	- Perikanan	2,25	2,08	2,94	2,68	2,66	
2.	Pertambangan dan penggalian.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,004
3.	Industri Pengolahan	53,54	53,78	52,42	52,68	52,04	52,89
	- Makanan, minuman & tembakau	11,06	12,07	14,64	14,82	14,81	
	- Tekstil, barang kulit dan alas kaki	6,60	6,19	5,94	5,78	5,64	
	- Barang kayu & hasil hutan lainnya	2,66	2,56	3,00	3,02	2,97	
	- Kertas dan barang cetakan	12,58	12,64	9,07	9,18	9,04	
	- Pupuk, Kimia dan Barang karpet	5,87	5,59	5,80	5,87	5,78	
	- Barang Galian Non Logam	3,13	3,14	2,87	2,93	2,91	
	- Logam Dasar	5,93	4,96	4,61	4,63	4,46	
	- Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	4,85	5,78	5,53	5,48	5,48	
	- Industri Pengolahan Lainnya	0,85	0,85	0,96	0,97	0,96	
4.	Listrik, Gas & Air bersih	2,90	2,97	3,65	3,75	3,80	3,41
5.	Konstruksi	2,84	2,84	2,99	3,23	3,23	3,03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,91	20,76	20,09	20,39	20,46	20,52
	- Perdagangan besar	19,85	19,71	19,15	19,44	19,45	
	- Hotel	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	
	- Restoran	1,01	1,00	0,89	0,89	0,95	
7.	Angkutan dan Komunikasi.	7,55	7,56	6,43	6,33	6,96	6,97
	7.1. Angkutan	6,88	6,80	5,43	5,06	5,66	
	7.2. Komunikasi	0,67	0,75	1,00	1,26	1,30	
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan.	3,34	3,27	3,64	3,47	3,44	3,43
	- Bank	0,39	0,38	0,27	0,14	0,14	
	- Lembaga Keuangan Non Bank	0,21	0,22	0,25	0,25	0,24	
	- Sewa Bangunan	1,64	1,62	1,97	1,94	1,94	
	- Jasa Perusahaan	1,10	1,05	1,16	1,14	1,12	
9.	Jasa-jasa	4,30	4,13	4,67	4,64	4,64	4,48
	- Pemerintahan Umum	1,86	1,77	2,14	2,08	2,05	
	- Perorangan dan Rumah Tangga	2,45	2,36	2,53	2,55	2,59	
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001

Dari Tabel 5.4 tampak bahwa sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata selama lima tahun terakhir (1996 – 2000) mencapai 52,89%, sedangkan sumbangan terkecil berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang rata-rata hanya sebesar 0,004% per tahunnya. Sumbangan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Sidoarjo khususnya pengolahan makanan, minuman dan pengolahan barang cetakan mendominasi pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin membaiknya perhatian investor baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap pengembangan sektor industri terutama industri kecil yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu perhatian pemerintah daerah yang cukup besar bagi perkembangan sektor industri kecil dan menengah seiring dengan berkembangnya asumsi bahwa industri kecil merupakan sektor yang cukup mampu bertahan di tengah krisis ekonomi.

Kontributor kedua penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan hotel dan restoran yang rata-rata setiap tahunnya menyumbangkan sebesar 20,52% kepada pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo. Sumbangan terbesar dalam sektor perdagangan ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan sub sektor hotel dan restoran hanya mampu memberikan sumbangan yang sangat kecil. Pertumbuhan sektor perdagangan besar ini sangat dipengaruhi oleh lokasi yang strategis dimana sangat berdekatan dengan kotamadya Surabaya, bahkan merupakan salah satu sentra perdagangan besar di Provinsi Jawa Timur.

Sektor pertanian walaupun hanya relatif kecil namun masih mampu memberikan sumbangan pertumbuhan PDRB dengan rata-rata sebesar 5,27% per tahunnya. Sektor pertanian ini merupakan sektor penyumbang ketiga terbesar setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sub sektor yang memberikan kontribusi secara dominan dalam sektor pertanian adalah sub sektor perikanan dan tanaman bahan makanan. Lambannya pertumbuhan sektor ini antara lain dipengaruhi oleh faktor perkembangan tingkat pendidikan yang semakin baik, faktor musim yang seringkali kurang menguntungkan dan semakin menyempitnya lahan pertanian, juga dikarenakan persepsi masyarakat akan tingkat upah dan indeks nilai tukar petani yang sering dirasakan belum dapat mencapai kebutuhan hidup.

5.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari penerimaan rutin daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen lainnya adalah sisa anggaran tahun sebelumnya, bagi hasil pajak/bukan pajak, sumbangan dan bantuan.

Bila dilihat dari target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun anggaran 1997/1998 – 2001, tampak bahwa pencapaian realisasi selalu berada di atas seratus persen yaitu berkisar antara 108,83% sampai dengan 130,68%. Kontribusi terbesar yang dari pendapatan daerah tersebut disumbangkan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan dari beberapa komponen tersebut ternyata PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, Pendapatan Dinas dan

Pendapatan Lainnya memberikan kontribusi yang paling besar terhadap jumlah pendapatan daerah, yaitu rata-rata pertahun mencapai 60,74%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001 (Dalam Jutaan Rp)

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Perusah. Daerah	Pendapt Dinas	Pendapt Lain	Pendapt BHP	Pendpt. BHBP	Jumlah Pendapatan	% PAD
1. 1997/1998									
- Target	11.624,34	14.566,70	846,00	1.836,65	660,10	14.574,71	1,00	44.109,50	
- Realisasi	11.576,83	14.534,59	732,98	2.147,85	1.618,61	17.385,34	9,10	48.005,30	63,7
- %	99,52	99,72	86,64	116,94	245,21	119,28	90,96	108,83	
2. 1998/1999									
- Target	11.867,50	13.365,81	402,50	2.272,95	2.96,13	16.685,00	10,00	47.563,89	
- Realisasi	15.236,34	13.765,45	147,97	2.636,90	3.619,48	19.192,67	10,40	54.609,20	64,8
- %	128,39	102,99	36,76	116,01	122,27	115,03	104,03	114,81	
3. 1999/2000									
- Target	15.489,00	18.497,15	87,50	1.200,00	1.037,80	19.262,60	5,42	55.579,47	
- Realisasi	18.054,91	19.665,03	28,92	1.386,48	18.054,91	25.180,24	16,54	65.732,30	61,6
- %	116,57	106,31	33,06	155,58	116,57	130,72	305,33	118,45	
4. 2000									
- Target	13.762,50	16.327,54	576,50	1.019,98	13.762,50	19.262,60	10,00	52.422,37	
- Realisasi	18.910,54	19.513,67	526,50	1.096,48	18.910,54	26.197,75	19,42	68.503,15	61,7
- %	137,41	119,51	91,33	107,50	137,41	136,00	194,15	130,68	
5. 2001									
- Target	27.035,00	36.118,49	1.204,21	656,93	27.035,00	47.060,82	1.945,00	116.222,44	
- Realisasi	28.718,28	35.593,19	1.204,21	589,33	28.718,28	62.293,93	2.334,87	133.790,02	51,6
- %	106,23	98,23	100,00	89,71	106,23	132,37	120,04	115,12	
Rata-rata kontribusi PAD per tahun									60,74

Sumber : : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2001

5.1.4 Lembaga Perbankan

Lembaga perbankan merupakan salah satu unsure yang sangat penting dalam perekonomian yang peranannya semakin tidak dapat diabaikan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo, terutama pada saat menghadapi era perdagangan yang semakin global. Lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya

bank umum namun juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang relatif kecil dan berlokasi di wilayah kecamatan-kecamatan. Adapun perkembangan jumlah kantor bank di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Jumlah Bank dan Kantor Bank menurut Jenis di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2000 – Mei 2002

Kelompok Bank	Tahun 2000	Tahun 2001	Mei 2002
1. Bank Umum			
1.1 Bank Pemerintah			
- Jumlah Bank	4	4	4
- Jumlah Kantor	31	32	32
- ATM	9	9	9
1.2 Bank Pemerintah Daerah			
- Jumlah Bank	1	1	1
- Jumlah Kantor	3	3	3
- ATM	1	1	1
1.3 Bank Swasta Nasional			
- Jumlah Bank	15	15	18
- Jumlah Kantor	31	32	36
- ATM	29	32	32
1.4 Bank Asing dan Campuran			
- Jumlah Bank	0	0	0
- Jumlah Kantor	0	0	0
- ATM	0	0	0
2. Bank Perkreditan Rakyat			
- Jumlah Bank	71	64	60
- Jumlah Kantor	76	69	65

Sumber : Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur
Bank Indonesia Surabaya, Mei 2002.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kantor bank di Kabupaten Sidoarjo tentunya juga diikuti dengan meningkatnya volume usaha yang tercermin dari besaran-besaran pos-pos tertentu antara lain jumlah aktiva, penghimpunan dana pihak

ketiga dan penyaluran kredit. Secara keseluruhan total aktiva baik bank umum maupun BPR dari periode sebelum krisis, pada saat mulai terjadinya krisis sampai dengan periode krisis tampak menunjukkan adanya peningkatan. Total aktiva bank umum pada posisi Mei 2002 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 226.768 juta atau 13,39 %, sedangkan total aktiva BPR mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp17.620 juta atau 10,04%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7

Perkembangan Total Aktiva Bank Umum dan BPR di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 1991 – Mei 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Bank Umum		BPR		Jumlah	
	Jumlah	Naik/Turun	Jumlah	Naik/Turun	Jumlah	Naik/Turun
Desember 1991	196.586	-	26.470	-	223.056	-
Desember 1997	660.483	463.897	89.735	63.265	750.218	527.162
Desember 2001	1.693.440	1.032.957	175.561	85.826	1.869.001	1.118.783
Mei 2002	1.466.672	(226.768)	193.181	17.620	1.659.853	(209.148)

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah – Provinsi Jawa Timur,
Bank Indonesia Surabaya Mei 2002.

Salah satu komponen yang sangat mempengaruhi peningkatan total aktiva adalah keberhasilan perbankan dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, deposito berjangka dan deposito dalam rupiah maupun valutas asing. Krisis ekonomi yang secara nasional menimbulkan dampak dalam proses intermediary perbankan tidak memberikan dampak khususnya dalam penghimpunan dana pihak ketiga bagi perbankan di Kabupaten Sidoarjo, bahkan dalam periode pasca krisis perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga khususnya pada bank umum terlihat

cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga dan rupiah maupun dalam valuta asing tampak dalam Tabel 5.8.

Seperti tampak pada Tabel 5.8, bahwa pada bulan Mei 2002 tabungan merupakan komponen terbesar dalam penghimpunan dana pihak ketiga yaitu mencapai sebesar Rp 873,8 milyar atau 45,18%, kemudian diikuti deposito berjangka mencapai sebesar Rp 772,4 juta atau 39,94% dan sisanya merupakan deposito berjangka. Sedangkan bila dilihat dari pertumbuhannya selama periode pasca krisis (1997 – 2002) baik giro, deposito berjangka dan tabungan masing-masing mencapai peningkatan rata-rata per tahun sebesar 65,32%, 68,34 dan 138,83%.

Tabel 5.8

Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing
pada Bank Umum di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 1997 – Mei 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Dana Pihak Ketiga						Jumlah
	Giro		Deposito Berjangka		Tabungan		
	Jumlah	Naik (%)	Jumlah	Naik (%)	Jumlah	Naik (%)	
1997	41.614	-	98.018	-	72.388	-	212.020
1998	45.884	10,26	290.683	196,56	71.654	(1,01)	408.221
1999	57.003	24,23	287.819	(0,99)	105.394	47,09	450.216
2000	200.733	252,14	648.180	125,20	775.188	635,51	1.624.109
2001	255.508	27,29	825.831	27,41	861.174	11,09	1.942.513
Mei 2002	287.925	12,69	772.421	(6,47)	873.774	1,46	1.934.120
Rata-rata	-	65,32	-	68,34	-	138,83	-

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah – Provinsi Jawa Timur,
Bank Indonesia Surabaya Mei 2002.

Sebagaimana fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga intermediary, yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan

kembali kepada masyarakat, perbankan di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir khususnya pasca krisis menunjukkan keadaan yang relatif stabil walaupun terdapat penurunan. Namun demikian secara regional bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan dan out standing kredit di Kabupaten Sidoarjo secara umum berada pada peringkat kedua setelah Kotamadya Surabaya. Dengan kondisi seperti itu maka fungsi intermediasi perbankan di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Pada tahun 1998 jumlah kredit masih mengalami peningkatan sebesar Rp2.129.956 juta atau 60,17% yaitu dari Rp3.540.126 juta menjadi Rp 5.670.082 juta, hal ini karena pada periode tersebut baru merupakan awal krisis ekonomi sehingga dari segi jumlah atau out standing belum berdampak walaupun dari segi kualitas kreditnya telah menurun (non lancar). Kemudian pada tahun 1999 terjadi penurunan sebesar Rp3.062.673 ribu atau 54,01% yaitu dari Rp 5.670.082 juta menjadi Rp 2.607.409 juta. Penurunan ini sangat dimungkinkan sebagai akibat dari penghapusan kredit-kredit non lancar yang dilakukan oleh beberapa bank dalam rangka memperbaiki kualitas aktiva produktifnya. Kemudian dari tahun 1999 sampai dengan Mei 2002 cenderung mengalami peningkatan secara stabil.

Tabel 5.9
Perkembangan Penyaluran Kredit Rupiah dan Valas pada Bank Umum di
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 1997 – Mei 2002 (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	1997	1998	1999	2000	2001	Mei 2002
Menurut Jenis Penggunaan						
- Modal Kerja	2.619.793	4.599.803	1.921.818	2.293.274	2.518.406	2.300.454
- Investasi	447.197	608.458	312.807	649.849	843.760	781.433
- Konsumsi	473.136	461.821	372.784	444.522	629.722	635.711
Menurut Sektor Ekonomi						
- Pertanian	36.938	56.888	52.704	98.929	263.592	254.326
- Pertambangan	4.175	70	0	589	49	0
- Perindustrian	2.332.022	2.976.688	1.674.711	2.248.391	2.367.187	2.058.570
- Listrik, Gas dan Air	13.097	10	0	21	50	677
- Konstruksi	153.949	145.487	66.645	63.946	62.090	32.852
- Perdagangan, Restoran, Hotel	463.565	1.982.415	446.774	434.520	481.491	454.186
- Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	10.614	8.533	4.614	6.106	9.823	22.758
- Jasa-jasa Dunia Usaha	41.195	3.444	8.997	24.697	142.489	149.002
- Jasa - Jasa Sosial Masyarakat.	11.435	7.726	7.180	6.288	8.355	9.806
- Lain-lain	473.136	461.821	372.784	504.158	656.762	735.421
JUMLAH	3.540.126	5.670.082	2.607.409	3.387.645	3.991.888	3.717.598

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah – Provinsi Jawa Timur,
Bank Indonesia Surabaya Mei 2002.

Dari Tabel 5.9 di atas tampak bahwa penyaluran kredit terbesar untuk tujuan modal kerja, yang selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 70,25 % dari total kredit. Sedangkan dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar diperuntukan bagi sektor perindustrian diikuti sektor perdagangan dan sektor lain-lain yang selama lima tahun terakhir secara rata-rata masing-masing mencapai 60,61%, 27,26 dan 14,49%.

5.2. Diskripsi Masing-masing Variabel

Dalam Bab IV (Metode Penelitian) dikemukakan bahwa variabel yang digunakan berupa variabel penghimpunan dana dan variabel penyaluran kredit yang kesemuanya

merupakan variabel bebas. Variabel-variabel bebas dimaksud meliputi jumlah penghimpunan dana dan jumlah penyaluran kredit yang disalurkan oleh BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi (X1), oleh BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang (X2) dan oleh BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah (X3).

Keseluruhan variabel akan diuraikan secara rinci baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran kreditnya. Uraian yang akan dirinci menyangkut perkembangan jumlah dan sejauh mana perbedaan yang terjadi pada rata-rata posisi penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang dicapai oleh masing-masing tiga kelompok BPR yaitu BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002. Perbedaan antar sampel akan dilihat dari besarnya rata-rata (mean) dan standar deviasi serta koefisien variasi pada masing-masing variabel. Perhitungan koefisien variasi akan digunakan untuk mengetahui merata atau tidaknya variasi antar sampel (variance between sample), dimana semakin besar persentase koefisien variasi akan menunjukkan semakin tidak meratanya distribusi penghimpunan dana dan penyaluran kredit pada masing-masing variabel, demikian sebaliknya.

5.2.1 Perkembangan Penghimpunan Dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu tiga belas bulan dari bulan Juni 2001 sampai dengan Juni 2002 disajikan dalam tabel 5.10.

Tabel 5.10

**PERBANDINGAN POSISI PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN KREDIT
PADA 15 (lima belas) BPR YANG BERADA DI KECAMATAN DENGAN POTENSI EKONOMI LEBIH, SEDANG DAN KURANG
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Bulan	BPR (Potensi Ekonomi Tinggi)			BPR (Potensi Ekonomi Sedang)			BPR (Potensi Ekonomi Rendah)			Total (Dalam Milyar Rp)		
		DPK	Kredit	Kredit/DPK	DPK	Kredit	Kredit/DPK	DPK	Kredit	Kredit/DPK	DPK	Kredit	Kredit/DPK
2001	Juni	8.08	11.95	147.86%	11.36	17.39	153.01%	5.48	7.81	142.43%	24.93	37.14	149.01%
	Juli	8.61	11.96	138.90%	11.09	17.80	160.60%	5.42	7.85	144.83%	25.12	37.61	149.76%
	Agustus	8.93	12.47	139.57%	10.74	18.10	168.54%	5.97	8.62	144.39%	25.64	39.19	152.82%
	September	9.96	13.06	131.11%	11.09	18.76	169.17%	6.22	9.28	149.19%	27.28	41.11	150.71%
	Oktober	10.16	13.77	135.48%	11.37	18.76	164.99%	6.37	9.17	143.84%	27.90	41.69	149.42%
	November	10.70	14.27	133.32%	11.83	19.37	163.67%	6.47	9.43	145.75%	29.01	43.07	148.47%
	Desember	10.31	14.96	145.11%	11.81	19.03	161.09%	6.64	9.61	144.73%	28.76	43.59	151.59%
2002	Januari	11.11	14.90	134.15%	12.49	19.63	157.18%	6.81	9.79	143.79%	30.40	44.32	145.77%
	Februari	11.54	15.14	131.19%	12.26	19.93	162.52%	6.57	9.81	149.19%	30.38	44.88	147.74%
	Maret	11.74	15.05	128.19%	12.42	20.66	166.25%	6.68	9.74	145.91%	30.84	45.45	147.36%
	April	12.60	15.96	126.62%	13.08	20.89	159.72%	6.92	9.84	142.27%	32.60	46.69	143.22%
	Mei	14.60	16.32	111.80%	13.07	21.59	165.20%	7.22	10.27	142.14%	34.89	48.18	138.09%
	Juni	14.38	16.57	115.24%	12.72	23.14	181.88%	7.54	10.59	140.43%	34.64	50.30	145.20%
	Mean	10.98	14.34	132.20%	11.9	19.9	164.14%	6.49	9.37	144.53%	29.41	43.33	147.63%
Standart Deviasi	2.01	1.59		0.8	1.6		0.61	0.84		3.31	3.95		
Koefisien Variasi	18.33%	11.06%		6.58%	8.27%		9.45%	8.95%		11.26%	9.11%		

Sumber Bank Indonesia Surabaya (data diolah).

Keterangan:

DPK Daana Pihak ketiga (Tabungan dan Deposito Berjangka).

Selama kurun waktu tiga belas bulan, rata-rata posisi penghimpunan dana oleh lima belas BPR di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 29,4 milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 3,9 milyar dan koefisien variasi sebesar 11,26%. Posisi penghimpunan dana tertinggi terjadi pada bulan Mei 2002 sebesar Rp 34,9 milyar dan terendah terjadi pada bulan Juni 2001 sebesar Rp 24,9 milyar, dengan perkembangan dari bulan ke bulan relatif stabil atau dapat dikatakan merata (*flat*). Sehingga wajar bila koefisien variasinya relatif kecil yaitu sebesar 11,26%. Dari posisi Juni 2001 sampai dengan akhir periode penelitian yaitu Juni 2002 posisi dana yang berhasil dihimpun oleh lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan. Walaupun terdapat penurunan pada bulan Desember 2001 dan Juni 2002 dibandingkan bulan sebelumnya namun secara relatif penurunan tersebut relatif kecil.

Perkembangan penghimpunan dana pada masing-masing kelompok BPR berdasarkan lokasi kecamatan sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki yaitu tinggi, sedang dan rendah, dapat pula dilihat pada tabel 5.10. Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi rata-rata posisi penghimpunan dana sebesar Rp10,98 milyar, dengan standar deviasi sebesar Rp 2,01 milyar dan koefisien variasinya sebesar 18,33%. Besarnya standar deviasi dan fluktuasi antar posisi atau koefisien variasinya menempati urutan tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan rendah. Dari bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 penghimpunan dana yang

berhasil dihimpun cenderung mengalami peningkatan secara stabil yaitu mencapai sebesar Rp 6,3 milyar atau 77,92% yaitu dari Rp 8,08 milyar menjadi Rp 14,38, milyar, dan tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan rendah. Pada bulan Juni 2002 terjadi penurunan, namun penurunan tersebut relatif kecil dan kurang berpengaruh terhadap kecenderungan peningkatan yang terjadi.

Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang, rata-rata penghimpunan dana mencapai sebesar Rp 11,95 milyar, dan merupakan rata-rata tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah. Standar deviasi sebesar Rp 0,79 milyar dengan koefisien variasi hanya sebesar 6,58%. Koefisien variasi sebesar 6,58% merupakan koefisien terendah bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah. Dari bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 penghimpunan dana yang berhasil dihimpun cenderung mengalami peningkatan secara stabil dengan besaran peningkatan sebesar Rp 1,36 milyar atau 11,98% yaitu dari Rp 11,36 milyar menjadi Rp 12,72 milyar, atau terendah bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah. Terjadi beberapa kali penurunan yaitu pada bulan Juli 2001, Agustus 2001, Desember 2001, Februari 2002, Mei 2002 dan Juni 2002 bila dibandingkan dengan posisi bulam sebelumnya, sehingga penurunan tersebut walaupun relatif kecil namun berpengaruh terhadap kecenderungan peningkatan yang terjadi.

Kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah, rata-rata penghimpunan dana mencapai sebesar Rp 6,49 milyar, dan standar deviasi sebesar Rp 0,61 milyar serta koefisien variasi sebesar 9,45%. Rata-rata penghimpunan dana dan standar deviasi pada kelompok BPR ini terendah bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan sedang. Dari bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 penghimpunan dana yang berhasil dihimpun cenderung mengalami peningkatan secara stabil dan besaran peningkatannya lebih tinggi yaitu sebesar Rp 2,78 milyar atau 35,60% yaitu dari Rp 7,81 milyar menjadi Rp 10,59 milyar, bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan sedang. Selama kurun waktu tiga belas bulan tersebut hanya terjadi satu kali penurunan yaitu pada bulan Februari 2002 bila dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, sehingga penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap kecenderungan peningkatan yang terjadi.

5.2.2 Penyaluran Kredit

Perkembangan penyaluran kredit oleh lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu tiga belas bulan dari bulan Juni 2001 sampai dengan Juni 2002 dapat pula dilihat pada tabel 5.10. Selama kurun waktu tiga belas bulan, rata-rata penyaluran kredit oleh lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 43,3 milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 3,9 milyar dan koefisien variasi sebesar 9,11%. Posisi penyaluran kredit tertinggi terjadi pada bulan Juni 2002 sebesar Rp 50,3 milyar dan

terendah terjadi pada bulan Juni 2001 sebesar Rp 37,1 milyar, dengan peningkatan dari bulan ke bulan relatif stabil atau dapat dikatakan merata (*flat*). Sehingga wajar bila koefisien variasinya relatif kecil yaitu sebesar 11,26%. Dari posisi Juni 2001 sampai dengan akhir periode penelitian yaitu Juni 2002 penyaluran kredit oleh lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan secara stabil. Perbedaan antara jumlah tertinggi dan jumlah yang terendah relatif kecil tidak mencapai satu kali lipat, sehingga hasil perhitungan koefisien variasinya juga menjadi relatif kecil yaitu 9,11%, di sisi lain distribusi penyaluran kredit pada kurun waktu tersebut juga relatif merata dari bulan ke bulan.

Dari Tabel 5.10 terlihat pula perkembangan penyaluran kredit pada masing-masing kelompok BPR berdasarkan lokasi kecamatan sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki yaitu tinggi, sedang dan rendah, Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, rata-rata posisi penyaluran kredit sebesar Rp14,34 milyar, dengan standar deviasi sebesar Rp 1,59 milyar dan koefisien variasinya relatif tinggi yaitu sebesar 11,06%. Besarnya fluktuasi antar posisi atau koefisien variasinya paling tinggi bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan rendah. Dari bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 penyaluran kredit tampak mengalami peningkatan secara stabil yaitu mencapai sebesar Rp 4,62 milyar atau 38,67% yaitu dari Rp 16,57 milyar menjadi Rp 11,95 milyar, dan tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan rendah. Pada bulan Januari dan Maret

2002 terjadi penurunan dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, namun penurunan tersebut relatif kecil dan kurang berpengaruh terhadap kecenderungan peningkatan yang terjadi.

Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang, rata-rata penyaluran kredit mencapai sebesar Rp 19,62 milyar, dan merupakan rata-rata tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah. Standar deviasi sebesar Rp 1,62 milyar dengan koefisien variasi hanya sebesar 8,27%. Koefisien variasi sebesar 8,27% merupakan koefisien terendah bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah. Dari bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 penyaluran kredit oleh kelompok BPR ini cenderung mengalami peningkatan secara stabil, walaupun besaran peningkatannya hanya sebesar Rp 5,75 milyar atau 33,11% yaitu dari Rp 17,38 milyar menjadi Rp 23,14 milyar, terendah bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan rendah. Selama kurun waktu tiga belas bulan hanya terjadi penurunan yaitu pada bulan Oktober 2001 namun jumlahnya relatif sangat kecil, sehingga penurunan tersebut secara relatif tidak berpengaruh terhadap kecenderungan peningkatan yang terjadi.

Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah rata-rata penyaluran kreditnya mencapai sebesar Rp 9,37 milyar, dan standar deviasi sebesar Rp 0,84 milyar serta koefisien variasi sebesar 8,95%. Rata-rata penyaluran kredit pada kelompok BPR ini terendah bila dibandingkan dengan kelompok

BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan sedang. Dari bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Juni 2002 penyaluran kredit cenderung mengalami peningkatan secara stabil dengan besaran peningkatannya lebih tinggi yaitu sebesar Rp 2,78 milyar atau 35,60% yaitu dari Rp 7,81 milyar menjadi Rp 10,59 milyar, bila dibandingkan dengan kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang. Selama kurun waktu tiga belas bulan tersebut hanya terjadi satu kali penurunan yaitu pada bulan Oktober 2001 bila dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, sehingga penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap kecenderungan peningkatan yang terjadi.

Bila dicermati lebih teliti, maka terlihat adanya suatu fenomena yang menarik yaitu baik jumlah maupun rata-rata penghimpunan dana dan penyaluran kredit oleh kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang, berada pada urutan tertinggi dimana sampai dengan bulan Juni 2002 jumlah penghimpunan dana mencapai sebesar Rp 12,72 milyar dengan rata-rata sebesar Rp 1,95 milyar. Kemudian jumlah penyaluran kredit pada posisi yang sama mencapai sebesar Rp 23,14 milyar dengan rata-rata sebesar Rp 19,62 milyar.

5.2.3 Perbandingan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit.

Pada uraian sebelumnya telah diungkapkan mengenai pencapaian penghimpunan dana dan penyaluran kredit oleh lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo. Uraian berikutnya adalah perbandingan antara posisi penghimpunan dana dan posisi penyaluran kredit yang telah dilakukan oleh kelima belas BPR dimaksud baik secara total maupun secara kelompok.

Perbandingan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut perlu dicermati lebih lanjut mengingat hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan fungsi *financial intermediary* yang dilaksanakan oleh BPR.

Masih dari Tabel 5.10, selama kurun waktu tiga belas bulan yaitu dari bulan Juni 2001 sampai dengan Juni 2002 rata-rata penyaluran kredit dari lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar Rp43,3 milyar, atau mencapai 147,63% dibandingkan dengan rata-rata penghimpunan dana pada kurun waktu yang sama yaitu sebesar Rp 29,4 milyar. Dari rata-rata total tersebut prosentase hasil perbandingan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2001 yaitu sebesar 152,82% dan terendah pada bulan Mei 2002 yaitu sebesar 138,09%. Perkembangan prosentase perbandingan selama kurun waktu penelitian tampak berfluktuatif, dimana dari posisi Juni sampai dengan Desember 2001 perkembangan prosentase perbandingan relatif stabil sedangkan pada periode Januari sampai dengan Mei 2002 perbandingannya tampak cenderung menurun dan baru pada bulan Juni 2002 terjadi peningkatan kembali daripada posisi bulan-bulan sebelumnya.

Perbandingan posisi penghimpunan dana dan penyaluran kredit pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi, selama kurun waktu tiga belas bulan yaitu dari bulan Juni 2001 sampai dengan Juni 2002 menunjukkan rata-rata penyaluran kredit mencapai sebesar Rp 14,34 milyar, atau mencapai 132,20% dibandingkan dengan rata-rata penghimpunan dana pada kurun waktu yang sama sebesar Rp 10,98 milyar. Dari rata-rata total tersebut prosentase hasil perbandingan

tertinggi terjadi pada bulan Juni 2001 yaitu sebesar 147,86% dan terendah pada bulan Mei 2002 yaitu sebesar 111,80%. Perkembangan prosentase perbandingan selama kurun waktu penelitian tampak berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, dimana dari posisi Juni sampai dengan November 2001 perkembangan prosentase perbandingan relatif menurun yaitu menjadi 133,32%. Pada bulan Desember 2001 terjadi peningkatan menjadi 145%, namun demikian pada periode berikutnya sampai dengan posisi Mei 2002 tampak terus menurun sampai dengan angka terendah yaitu 111,80%, dan baru pada bulan Juni 2002 terjadi peningkatan kembali menjadi 115,24%. Secara umum perkembangan perbandingan antara penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana selama kurun waktu penelitian cenderung secara relatif mengalami penurunan.

Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang, perkembangan perbandingan antara penyaluran kredit dengan penghimpunan dana selama kurun waktu tiga belas bulan yaitu dari bulan Juni 2001 sampai dengan Juni 2002 rata-rata penyaluran kredit mencapai sebesar Rp19,62 milyar, atau mencapai 164,14% dibandingkan dengan rata-rata penghimpunan dana pada kurun waktu yang sama yaitu sebesar Rp 11,95 milyar. Dari rata-rata total tersebut prosentase hasil perbandingan tertinggi terjadi pada bulan Juni 2002 yaitu sebesar 181,88% dan terendah pada bulan Juni 2001 sebesar 153,01%. Perkembangan prosentase perbandingan selama kurun waktu penelitian sedikit berfluktuatif, dimana dari posisi Oktober 2001 sampai dengan Januari 2002 perkembangan prosentase perbandingan mengalami penurunan hingga mencapai 157,18%, kemudian pada periode berikutnya tampak cenderung mengalami peningkatan dan bahkan pada bulan Juni 2002 terjadi peningkatan tertinggi

mencapai 181,88%. Secara umum perkembangan perbandingan antara penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana selama kurun waktu penelitian cenderung mengalami peningkatan secara stabil.

Pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah, perkembangan perbandingan antara penyaluran kredit dengan penghimpunan dana selama kurun waktu tiga belas bulan yaitu dari bulan Juni 2001 sampai dengan Juni 2002 rata-rata penyaluran kredit mencapai sebesar Rp 9,37 milyar, atau mencapai 144,53% dibandingkan dengan rata-rata penghimpunan dana pada kurun waktu yang sama yaitu sebesar Rp 6,49 milyar. Dari rata-rata total tersebut prosentase hasil perbandingan tertinggi terjadi pada bulan September 2001 dan Februari 2002 masing-masing sebesar 149,19% dan terendah pada bulan Juni 2001 sebesar 140,43%. Perkembangan prosentase perbandingan selama kurun waktu penelitian sedikit berfluktuatif, dimana pada bulan Oktober 2001 dan Januari 2002 mengalami penurunan, kemudian pada bulan Februari 2002 mengalami peningkatan menjadi 149,19%. Namun demikian secara berturut-turut pada periode berikutnya sampai dengan bulan Juni 2002 tampak cenderung mengalami penurunan sampai angka terendah sebesar 140,43%. Secara umum perkembangan perbandingan antara penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana selama kurun waktu penelitian cenderung mengalami penurunan.

Bila dicermati lebih teliti, tampak bahwa dari ketiga kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, maka perkembangan prosentase perbandingan antara penyaluran kredit dengan penghimpunan dana pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang,

menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan meningkat secara stabil. Sementara pada kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dan sedang, selama kurun waktu penelitian menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan menurun.

5.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

5.3.1 Analysis Of Variance (ANOVA)

Dari hasil perhitungan microstat ONE-WAY ANOVA diperoleh rata-rata total (*grand mean*) yaitu hasil rata-rata mean posisi penghimpunan dana dari lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah posisi bulan Juni 2002 sebesar Rp 2.31 milyar. Selanjutnya mencari besarnya variance pembilang dengan menggunakan rumus seperti pada angka 2.4, microstat menghitung besarnya variance pembilang dengan menggunakan derajat bebas atau *degree of freedom* sebesar dua ($df1 = j - 1 = 3 - 1 = 2$), hingga diperoleh hasil Rp 2,55 milyar. Selanjutnya dicari besarnya variance penyebut dengan cara mengkuadratkan standar deviasi masing-masing kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, yang diteliti hingga diperoleh besarnya variance posisi penghimpunan dana masing-masing kelompok BPR. Perhitungan berikutnya dengan menjumlahkan variance masing-masing kelompok BPR menggunakan derajat bebas sebesar dua belas ($df2 = j (i - 1) = 12$), maka diperoleh variance penyebut sebesar Rp 2,96 milyar. (lihat lampiran 1).

Perhitungan selanjutnya membagi variance pembilang dengan variance penyebut hingga diperoleh F test hitung sebesar 0,86 dengan probabilitas kesalahan sebesar

44,65 %. Langkah berikutnya membandingkan besarnya F test hitung dengan F test tabel (menggunakan Tabel F). Dalam penelitian ini menggunakan lima belas jumlah kasus, sehingga F test tabel yang digunakan adalah *degree of freedom* pembilang sebanyak 2 (dua) dan *degree of freedom* penyebut sebesar 12 (dua belas), serta *Level of Significan* sebesar 1 % maka dapat diketahui F ratio tabel sebesar 6,93 atau $F(1\%, 2, 12) = 6,93$. Dengan mengacu pada perhitungan tabel tersebut, jika *degree of freedom* pembilang numerator (horizontal) = 2 dan *degree of freedom* penyebut denominator (vertikal) = 12 serta tingkat kesalahan (probability) = 0.01 maka nilai F test tabel lebih 6,93. Hal ini berarti bahwa nilai F test hitung lebih kecil dari F test tabel.

Dari uraian tersebut didapati bahwa F test hitung lebih kecil dari F test tabel ($F_{to} < F_{tt}$), dengan demikian maka secara statistik dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata posisi penghimpunan dana antar tiga kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah yang diteliti dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (probabilitas 0,4465). Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi "diduga ada perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah", ditolak dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (Probabilitas = 0,4465).

Analisis berikutnya akan mencoba menguji hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini tentang perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit pada lima belas BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah. Perhitungan microstat memperoleh hasil rata-rata total (*grand mean*) yaitu hasil rata-

rata mean posisi penyaluran kredit pada posisi bulan Juni 2002 sebesar Rp3,35 milyar. Selanjutnya mencari besarnya variance pembilang, dimana perhitungan microstat menghasilkan besarnya variance pembilang dengan menggunakan derajat bebas atau *Degree of Freedom* ($df1 = j - 1 = 3 - 1 = 2$) J diperoleh hasil Rp 7,87 milyar.

Perhitungan selanjutnya yaitu mencari besarnya variance penyebut dengan cara mengkuadratkan standar deviasi masing-masing tiga kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, yang diteliti hingga diperoleh besarnya variance posisi penyaluran kredit masing-masing kelompok BPR dimaksud. Perhitungan berikutnya menjumlahkan variance masing-masing kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah dengan menggunakan *degree of freedom* sebesar dua belas ($df2 = j(i - 1) = 12$), maka diperoleh variance penyebut sebesar Rp 4,92 miliar. (lihat lampiran 2)

Perhitungan selanjutnya membagi variance pembilang dengan variance penyebut hingga diperoleh F test hitung sebesar 1,60 dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (probabilitas = 0,2413). Langkah berikutnya membandingkan besarnya F test hitung dengan F test tabel (menggunakan Tabel F). Dalam penelitian ini menggunakan jumlah kasus cukup besar dan tidak terwakili oleh tabel statistik, maka F test tabel yang digunakan adalah *degree of freedom* pembilang sebanyak 2 (dua) dan *degree of freedom* penyebut sebesar 12 (dua belas), dengan *Level of Significance* sebesar 1% maka dapat diketahui F ratio tabel sebesar 6,93 atau $F(1\%, 2, 12) = 6,93$. Dengan mengacu pada perhitungan tabel tersebut, jika *degree of freedom* pembilang numerator (horizontal) = 2 dan *degree of freedom* penyebut denominator (vertikal) = 12 dengan tingkat kesalahan

(probability) = 0,01 maka dapat dipastikan nilai F test tabel lebih besar dari 1,60. Ini berarti nilai F test hitung lebih kecil dari F test tabel.

Apabila hasil perhitungan F test hitung lebih kecil dari F test tabel atau ($F_{to} < F_t$), maka secara statistik dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata posisi penyaluran kredit antar tiga kelompok BPR yang berlokasi di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah yang diteliti dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (probabilitas 0,2413). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan "diduga ada perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah" ditolak dengan probabilitas kesalahan kurang dari satu persen (Probabilitas = 0,2413).

5.3.2 Analisis Regresi

Untuk mengetahui sejauhmana signifikansi koefisien regresi variabel X_1 secara parsial, akan dilakukan dengan uji t pada variabel bebasnya. Untuk variabel yang memiliki koefisien regresi bertanda positif (+), apabila t observasi lebih kecil dari t tabel ($t_0 \leq t_1$), maka koefisien parameter yang diperkirakan tidak ada perbedaan dengan nol atau tidak signifikan, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Sebaliknya bila t hitung atau observasi lebih besar dari t-tabel ($t_0 > t_1$), maka koefisien regresi yang diperkirakan ada perbedaan dengan nol atau berarti signifikan pada tingkat kepercayaan sebesar 5 %, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Sedangkan apabila hasil perhitungan parameter koefisien regresi yang diperkirakan bertanda negatif (-), dan juga hasil perhitungan t atau t observasi lebih

besar atau sama dengan t tabel ($t_0 \geq t_{\alpha}$), maka parameter koefisien regresi yang diperkirakan ada perbedaan dengan nol atau signifikan pada tingkat kepercayaan 5 %, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Demikian pula sebaliknya, bila t hitung atau t observasi lebih kecil dari t tabel ($t_0 < t_{\alpha}$), maka parameter koefisien regresi yang diperkirakan tidak ada perbedaan dengan nol atau tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5 %, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Variabel bebas dari seluruh BPR sampel yang dilakukan pengujian dalam penelitian ini, baik secara kelompok kriteria kecamatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, maupun secara individual BPR, seluruhnya mempunyai parameter koefisien regresinya yang tidak sama dengan nol. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 5 %, dan derajat kebebasan 11 (DF=11), maka besarnya t tabel sebesar 2,201 ($t = 2,201$).

Uraian berikut merupakan penjelasan secara rinci dari hasil perhitungan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari sumber-sumber data primer.

A. BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi.

Dari hasil perhitungan, parameter koefisien regresi jumlah penghimpunan dana sebesar 0,7446 satuan, secara teori tanda positif disini adalah benar, artinya setiap peningkatan penghimpunan dana (X_1) akan berdampak pada peningkatan jumlah penyaluran kredit (X_2). Dengan parameter koefisien regresi positif sebesar 0,7446 satuan dan hasil t hitung/observasinya yang diperoleh sebesar 2,201 serta tingkat probabilitas kesalahan kurang dari 5% (Prob = 0,00000), maka besarnya t hitung 9,556 (T_0

= 9,556) lebih besar dari t tabel sebesar 2,201 ($t_t = 2,201$) atau dengan kata lain $T_0 = 9,556 > t_t = 2,201$. Dengan demikian maka terdapat perbedaan dengan nol sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

B. BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang.

Dari hasil perhitungan, parameter koefisien regresi jumlah penghimpunan dana sebesar 1,7594 satuan, secara teori tanda positif disini adalah benar, artinya setiap peningkatan penghimpunan dana (X1) akan berdampak pada peningkatan jumlah penyaluran kredit (X2). Dengan parameter koefisien regresi positif sebesar 1,7594 satuan dan hasil t hitung/observasinya yang diperoleh sebesar 2,201 serta tingkat probabilitas kesalahan kurang dari 5% (Prob = 0,00022), maka besarnya t hitung 5,404 ($T_0 = 5,404$) lebih besar dari t tabel sebesar 2,201 ($t_t = 2,201$) atau dengan kata lain $T_0 = 5,404 > t_t = 2,201$. Dengan demikian maka terdapat perbedaan dengan nol sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

C. BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah.

Dari hasil perhitungan, parameter koefisien regresi jumlah penghimpunan dana sebesar 1,3431 satuan, secara teori tanda positif disini adalah benar, artinya setiap peningkatan penghimpunan dana (X1) akan berdampak pada peningkatan jumlah penyaluran kredit (X2). Dengan parameter koefisien regresi positif sebesar 1,3431 satuan dan hasil t hitung/observasinya yang diperoleh sebesar 2,201 serta tingkat

probabilitas kesalahan kurang dari 5% ($\text{Prob} = 0,00000$), maka besarnya t hitung $16,900$ ($T_0 = 16,900$) lebih besar dari t tabel sebesar $2,201$ ($t_t = 2,201$) atau dengan kata lain $T_0 = 16,900 > t_t = 2,201$. Dengan demikian maka terdapat perbedaan dengan nol sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

5.4. Pembahasan Hasil Penelitian

5.4.1 Pengujian hipotesis dengan model analisis ANOVA

Dari hasil pengujian hipotesis dengan model ONE WAY ANOVA dengan microstat bahwa hipotesis pertama tidak terbukti, dimana tidak terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata posisi penghimpunan dana oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo. Hipotesis kedua juga tidak terbukti, dimana tidak terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata posisi penyaluran kredit oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo. Analisis statistik hanya mampu membuktikan ada atau tidaknya perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana dan penyaluran kredit pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan untuk mempertajam analisis akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan BPR untuk memberdayakan ekonomi rakyat dalam era otonomi daerah dan kemampuan BPR dalam menjalankan fungsi intermediasi serta penilaian terhadap beberapa indikator keberhasilan BPR dilihat dari aspek penilaian tingkat kesehatan BPR.

Dari kenyataan tersebut berarti bahwa lokasi dimana BPR berada bukan

merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi baik tidaknya kinerja keuangan BPR, termasuk hasil penilaian Tingkat Kesehatannya. Hal ini berarti pula bahwa BPR yang berada di lokasi kecamatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, tidak selamanya kinerja keuangannya akan lebih baik dibandingkan dengan BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi yang sedang atau rendah, demikian pula sebaliknya. Namun demikian salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR adalah faktor pengelolaan manajemen.

5.4.2 Pengujian hipotesis dengan model analisis Regresi

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model analisis regresi, maka hipotesis ketiga terbukti dimana terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penghimpunan dana terhadap penyaluran kredit, yang dilakukan oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo. Analisis korelasi antara penghimpunan dana terhadap penyaluran kredit dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi, atas dasar data series penghimpunan dana dan penyaluran kredit selama 13 (tiga belas) bulan dari Juni 2001 sampai dengan Juni 2002. Analisis regresi tersebut dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh mengenai sejauhmana kemampuan masing-masing BPR dalam menjalankan fungsi intermediasi baik secara individual BPR maupun secara kelompok berdasarkan lokasi kecamatan dan secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab terdahulu, bahwa fungsi utama BPR adalah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kemampuan BPR

dalam menjalankan fungsi intermediasi tercermin dari kemampuannya dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit, dimana sumber dana utama dalam penyaluran kredit bersumber dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun yang berbentuk deposito berjangka maupun tabungan. Dengan demikian maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa kredit merupakan fungsi daripada dana. Untuk mengukur kemampuan masing-masing BPR dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan mengukur korelasi antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara series selama 13 (tiga belas) bulan sejak Juni 2001 s/d Juni 2002 dengan menggunakan model analisa regresi (Regression Analysis) dengan dua variabel, dimana kredit sebagai variabel tidak bebas (X2) dan dana sebagai variabel bebas (X1). Hasil penghitungan regresi dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Secara total korelasi antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang dilakukan oleh 15 (lima belas) BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, menunjukkan korelasi yang signifikan. Dengan tingkat korelasi tersebut berarti bahwa keberadaan BPR dimaksud telah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara maksimal. Namun demikian apabila dilihat dari masing-masing kelompok BPR berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh kecamatan-kecamatan dimana BPR tersebut berada, maka tampak bahwa BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah menunjukkan tingkat signifikan tertinggi yang berarti mampu menjalankan fungsi intermediasi paling baik, kemudian diikuti oleh BPR yang berada di kecamatan dengan

potensi ekonomi tinggi dan terendah tingkat signifikasinya berada pada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang.

Tabel 5.11

Korelasi Antara Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Terhadap 15 BPR Dengan Kinerja Sehat Di Kabupaten Sidoarjo.

No	Nama BPR	Kecamatan Lokasi BPR	b_1	b_2	T	Prob.	Keterangan
1.	BPR A1	Taman	0,4126	-0,6423	-2,780	0,01792	Signifikan
2.	BPR A2	Taman	0,8027	0,8959	6,689	0,00003	Signifikan
3.	BPR A3	Gedangan	0,6584	0,8114	4,605	0,00076	Signifikan
4.	BPR A4	Waru	0,7996	0,8942	6,624	0,00004	Signifikan
5.	BPR A5	Waru	0,7371	0,8585	5,553	0,00017	Signifikan
	TOTAL		0,8925	0,9447	9,556	0,00000	Signifikan
1.	BPR B1	Krian	0,0740	0,2721	0,933	0,36847	Tidak Signifikan
2.	BPR B2	Sidoarjo	0,8160	0,9033	6,983	0,00002	Signifikan
3.	BPR B3	Tarik	0,1106	0,3326	1,170	0,26690	Tidak Signifikan
4.	BPR B4	Krian	0,7082	0,8415	5,167	0,00031	Signifikan
5.	BPR B5	Krian	0,0114	0,1065	0,355	0,72901	Tidak Signifikan
	TOTAL		0,7264	0,8523	5,404	0,00022	Signifikan
1.	BPR C1	Candi	0,0695	-0,2636	-0,906	0,38422	Tidak Signifikan
2.	BPR C2	Candi	0,5593	0,7479	3,737	0,00328	Signifikan
3.	BPR C3	Porong	0,8415	0,9173	7,643	0,00001	Signifikan
4.	BPR C4	Porong	0,0052	0,0723	0,240	0,81452	Tidak Signifikan
5.	BPR C5	Tulangan	0,7208	0,8490	5,329	0,00024	Signifikan
	TOTAL		0,9629	0,9813	16,900	0,00000	Signifikan

Sumber : Data Primer (diolah).

Pada kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi yang terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Sedati, Gedangan, Taman dan Waru, korelasi dengan signifikansi tertinggi berada pada BPR A2 yang berada di kecamatan Taman, kemudian diikuti BPR A4 dan BPR A5 yang berada di kecamatan Waru, selanjutnya BPR A3 yang berada di kecamatan Gedangan. Kecamatan-kecamatan tersebut berada pada wilayah

kabupaten Sidoarjo yang relatif berdekatan dengan wilayah kota Surabaya, hal ini memungkinkan bagi BPR untuk mencari nasabah baik nasabah penyimpan dana (kreditur) maupun nasabah peminjam kredit (debitur). Hal ini juga menunjukkan bahwa walaupun di wilayah tersebut terdapat jumlah BPR terbanyak dan terjadi persaingan yang cukup ketat, namun BPR yang berada di kecamatan dimaksud masih menunjukkan kinerja yang cukup aktif. Sementara itu satu BPR yang berada di kecamatan Taman memiliki arah korelasi yang negatif, hal ini berarti bahwa BPR ini tidak mampu menjalankan fungsi intermediasinya karena di satu sisi jumlah penghimpunan dana cenderung meningkat namun tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah penyaluran kredit, bahkan terjadi kecenderungan yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kinerja keuangan BPR saat ini masih tergolong sehat, namun kurang mampu bersaing dalam mencari calon debitur atau kinerja manajemen yang kurang aktif.

Pada kecamatan dengan potensi ekonomi sedang yang terdiri dari empat kecamatan yaitu kecamatan Krian, Tarik, Buduran dan Sidoarjo, korelasi dengan signifikansi tertinggi berada pada BPR B2 yang berada di kecamatan Sidoarjo kemudian BPR B4 di kecamatan Krian, sementara tiga BPR lainnya yang berada di kecamatan Krian dan Tarik menunjukkan korelasi yang tidak signifikan. Kecamatan-kecamatan tersebut relatif berada di wilayah tengah kabupaten Sidoarjo dan terdapat jumlah BPR yang lebih sedikit dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Dari lima BPR tersebut, dua diantaranya khususnya yang berada di kecamatan Krian memiliki korelasi yang tidak signifikan meskipun masih menunjukkan korelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa BPR tersebut kurang mampu menjalankan

fungsi intermediasinya secara maksimal, atau juga mengindikasikan bahwa selain faktor manajemennya kurang aktif maka pada kecamatan-kecamatan tersebut telah menunjukkan tingkat kejenuhan BPR. Sementara itu satu-satunya BPR yang berada di kecamatan Tarik juga menunjukkan korelasi tidak signifikan walaupun jumlah penghimpunan dana dan penyaluran kredit BPR ini menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan BPR-BPR lainnya. Bila dilihat dari kinerja manajemen tampaknya telah cukup aktif tercermin dari pencapaian penghimpunan dana dan penyaluran kreditnya, namun hal ini lebih mengindikasikan bahwa di wilayah kecamatan ini telah mendekati titik jenuh, sehingga kemampuan BPR khususnya dalam mencari calon debitur telah semakin berkurang.

Sedangkan pada kecamatan dengan potensi ekonomi rendah yang terdiri dari sepuluh kecamatan, korelasi dengan signifikansi tertinggi berada pada BPR C3 yang berada di kecamatan Porong, kemudian diikuti oleh BPR C5 di kecamatan Tulangan, dan BPR C2 di kecamatan Candi. Sementara BPR C4 di kecamatan Porong dan BPR C1 di kecamatan Candi menunjukkan korelasi tidak signifikan, bahkan BPR C1 korelasinya negatif. Sebagian besar kecamatan-kecamatan tersebut berbatasan dengan kabupaten lain yaitu kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Jumlah BPR di kecamatan-kecamatan tersebut masing relatif sedikit dan terdapat lima kecamatan yang sama sekali belum terdapat BPR, sehingga bila dilihat dari kesempatan pengembangan usaha masih cukup terbuka bagi BPR yang ada maupun bagi BPR baru. Dua BPR lainnya yaitu BPR C1 dan BPR C4 yang berada di kecamatan Candi dan Porong menunjukkan korelasi tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pada dua kecamatan tersebut telah mencapai titik

jenuh dan terjadi persaingan yang cukup ketat mengingat di kedua kecamatan tersebut telah terdapat masing-masing 7 (tujuh) kantor BPR.

Penyebab yang dapat mempengaruhi tidak signifikannya korelasi antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit terhadap beberapa BPR sebagaimana table 6.3, sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan antara lain :

1. BPR A1 yang berlokasi di kecamatan Taman, korelasinya signifikan namun arahnya negatif, hal ini lebih dipengaruhi oleh kinerja manajemen yang kurang aktif karena salah satu anggota direksi mengundurkan diri, sementara pada periode sebelumnya BPR ini cukup aktif menyalurkan kredit, yang sumber dananya berasal dari pinjaman pihak ketiga (bank umum dan PNM). Dengan anggota direksi yang hanya satu orang maka ekspansi kredit diperlambat, sedangkan penghimpunan dana yang diperoleh untuk sementara digunakan untuk melunasi hutang/kewajiban pada bank umum.
2. BPR B1 dan B5 yang keduanya berada di pusat kota kecamatan Krian, dan masing-masing tingkat korelasinya tidak signifikan walaupun arahnya masih positif. Kinerja manajemen relatif baik tercermin dari kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, namun demikian mengingat di kecamatan Krian sudah terdapat 6 (enam) BPR dan penyebarannya terpusat di pusat kota kecamatan, maka tingkat persaingan yang terjadi sudah cukup ketat. Oleh karenanya kedua BPR ini (B1 dan B5) untuk sementara memfokuskan pada upaya penagihan kredit non lancar dan dana yang berhasil dihimpun ditempatkan pada antar bank aktiva.

3. BPR B3 yang berada di kecamatan tarik, korelasinya tidak signifikan walaupun arahnya masih positif, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan manajemen yang lebih berhati-hati yaitu mengurangi tingkat ekspansi kredit, di sisi lain juga mengurangi biaya dana yang relatif mahal. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada umumnya berbunga relatif rendah, sehingga digunakan untuk melunasi pinjaman dari pihak ketiga (bank umum dan PNM) yang bunganya relatif tinggi.
4. BPR C1 yang berlokasi di kecamatan Candi, korelasinya tidak signifikan dan arahnya negatif, hal ini lebih dipengaruhi oleh minimnya jumlah modal bank sehingga sumber dana penyaluran kredit yang lama sebagian besar dibiayai dari pinjaman pihak ketiga (bank umum dan PNM). Dana masyarakat yang berhasil dihimpun digunakan untuk mengurangi/melunasi pinjaman dari pihak ketiga yang bunganya relatif tinggi.
5. BPR C4 yang berada di kecamatan porong, korelasinya tidak signifikan walaupun arahnya masih positif, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan manajemen yang lebih berhati-hati yaitu mengurangi tingkat ekspansi kredit dan lebih berfokus pada penagihan kredit non lancar. Di sisi lain di kecamatan Porong sudah terdapat 7 (tujuh) BPR yang terkonsentrasi di pusat kota kecamatan porong, sehingga tingkat persaingan yang terjadi sudah cukup ketat.

5.5. Kemampuan BPR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Selanjutnya seperti telah diungkapkan pada Bab III, untuk mengetahui kemampuan BPR untuk memberdayakan ekonomi rakyat dalam era otonomi daerah khususnya di Kabupaten Sidoarjo, di lihat dari keberhasilannya dalam menyalurkan

kredit kepada masyarakat sekitarnya, dapat dilihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12

Perpencaran Penyaluran Kredit oleh BPR Dengan Kinerja Sehat yang Berada di Kecamatan Dengan Potensi Ekonomi Tinggi, Sedang dan Rendah di Kabupaten Sidoarjo (Dalam jutaan rupiah).

No	Nama BPR	Kecamatan Setempat		Kec. Lain di Kab. Sidoarjo		Kabupaten Lain di luar Sidoarjo		Kota Surabaya		Tota
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal
1.	BPR A1	109,28	9,29	579,20	49,23	198,98	16,91	289,05	24,57	1.176,50
2.	BPR A2	615,00	25,60	1.084,36	45,18	375,00	15,61	328,00	13,65	2.402,36
3.	BPR A3	60,53	13,55	446,66	26,27	240,93	14,17	952,02	56,00	1.700,14
4.	BPR A4	360,01	5,74	478,23	7,62	1.068,66	17,03	4.368,75	69,61	6.275,65
5.	BPR A5	260,98	5,21	3.555,83	70,92	0,00	0,00	1.196,80	23,87	5.013,61
	Jumlah	1.405,80	8,48	6.114,28	37,08	1.883,58	11,37	7.134,61	43,21	16.568,26
1.	BPR B1	619,75	20,98	663,96	22,48	743,23	25,16	926,28	31,36	2.953,21
2.	BPR B2	2.157,32	44,90	1.975,00	41,11	671,33	13,97	0,00	0,00	4.803,66
3.	BPR B3	1.065,06	11,64	1.903,18	20,80	5.745,54	62,80	434,42	4,74	9.148,20
4.	BPR B4	159,21	10,10	355,16	22,53	842,53	53,45	219,19	13,90	1.576,10
5.	BPR B5	1.228,50	26,35	1.568,58	94,37	69,62	1,49	1.795,40	38,51	4.662,10
	Jumlah	5.229,85	22,59	6.465,87	27,93	8.072,26	34,87	3.375,29	14,58	23.143,27
1.	BPR C1	313,15	36,10	309,82	35,71	224,49	25,87	0,00	0,00	867,45
2.	BPR C2	331,58	43,62	372,67	49,02	55,89	7,35	0,00	0,00	760,13
3.	BPR C3	880,70	23,46	1.138,20	30,33	1.675,40	0,44	58,42	1,55	3.752,72
4.	BPR C4	310,28	13,51	1.464,16	63,78	388,75	16,93	132,34	5,76	2.295,53
5.	BPR C5	557,65	19,14	1.354,38	46,48	981,50	33,68	0,00	0,00	2.913,52
	Jumlah	2.423,34	22,88	4.639,23	43,81	3.346,02	31,59	190,76	1,80	10.589,35
	Jumlah	9.058,99	18,00	17.219,38	34,23	13.301,86	26,44	10.700,66	21,27	50.300,88

Sumber : Data Primer

Dari Tabel 5.12, terlihat bahwa dari 15 (lima belas) BPR dengan kinerja sehat dimaksud mampu menyalurkan kredit sebesar Rp 50,30 milyar, dengan porsi terbesar disalurkan oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang yaitu sebesar Rp 23,14 milyar (46,00 %), kemudian diikuti oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi sebesar Rp 16,57 milyar (32,94%) dan terendah oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah sebesar

Rp 10,59 milyar (21,05 %). Bila dicermati lebih teliti hal ini sangat menarik bahwa ternyata kemampuan BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi dalam menyalurkan kreditnya masih lebih rendah dibandingkan dengan BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor persaingan, dimana di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi tingkat persaingannya jauh lebih ketat karena terdapat jumlah BPR yang lebih banyak. Sedangkan di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang tingkat persaingannya relatif lebih longgar karena jumlah BPR-nya lebih sedikit, sehingga BPR lebih mudah mencari nasabah peminjam kredit.

Bila dilihat dari penyebaran kredit berdasarkan wilayah penyalurannya tampak bahwa secara keseluruhan porsi terbesar disalurkan pada kecamatan di luar lokasi BPR namun masih berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar Rp 17,22 milyar (34,23%), diikuti oleh kabupaten lain di luar Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 13,30 milyar (26,44%), dan di Kota Surabaya sebesar Rp 10,70 milyar (21,27%) kemudian terendah disalurkan di kecamatan setempat dimana BPR tersebut berada yaitu sebesar Rp 9,59 milyar (18,00%). Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa apabila dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah, maka keberadaan BPR di Kabupaten Sidoarjo belum mampu secara maksimal dalam memberdayakan ekonomi rakyat pada tingkat pemerintahan kecamatan dimana BPR tersebut berada, walaupun bila dilihat pada tingkat pemerintahan Kabupaten keberadaan BPR telah mampu memberikan dukungan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dengan penyaluran kredit sebesar Rp 26,28 milyar

atau 52,25% dari total keseluruhan kredit. Namun demikian bila dilihat dari besarnya porsi penyaluran kredit ke kabupaten lain dan kota Surabaya yang mencapai Rp 24,00 milyar atau 47,71 % maka secara umum berarti BPR di Kabupaten Sidoarjo belum memberikan dukungan secara maksimal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Lebih jauh apabila dilihat berdasarkan pembagian wilayah sesuai dengan potensi ekonomi daerah kecamatan, maka BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi justru porsi penyaluran kredit terbesar di kota Surabaya sebesar Rp 7,13 (43,21%) kemudian di kecamatan di luar lokasi BPR namun masih berada di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 6,11 milyar (37,08 %), kemudian di kabupaten lain sebesar Rp 1,88 milyar (11,37%) dan terkecil di kecamatan setempat dimana BPR tersebut berada sebesar Rp 1,4 milyar (8,48%). Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan bila dikaitkan dengan kepentingan otonomi daerah, dimana pada wilayah kecamatan dengan potensi ekonomi yang tinggi justru kurang memberikan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan peningkatan ekonomi daerah, terlebih terhadap masyarakat di sekitar BPR tersebut berada. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya demikian antara lain adalah tingkat persaingan yang cukup ketat terkait dengan jumlah BPR yang lebih banyak dan keberadaan atau lokasi BPR yang relatif berdekatan dengan wilayah kota Surabaya, sehingga aksesnya lebih mudah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo.

Pada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang porsi penyaluran kredit terbesar berada di kabupaten lain di luar Sidoarjo sebesar Rp 8,07 milyar (34,87%) kemudian di kecamatan di luar lokasi BPR namun masih berada di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 6,47 milyar (27,93 %), kemudian di kecamatan setempat dimana BPR tersebut berada sebesar Rp 5,23 milyar (22,59%) dan terkecil di Kota Surabaya sebesar Rp 3,38 milyar (14,58%). Hal yang cukup menonjol adalah penyaluran kredit di kabupaten lain yang menduduki porsi terbesar yaitu 34, 87 %, sementara penyaluran kredit di kecamatan setempat dimana BPR berada walaupun lebih kecil namun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi. Dari segi kepentingan daerah, BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang secara total mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah dengan penyaluran kredit sebesar 50,52 %. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa beberapa BPR diantaranya berada di lokasi yang relatif berdekatan dengan wilayah kabupaten lain.

Pada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah porsi penyaluran kredit terbesar berada di kecamatan lain namun masih di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 4,64 milyar (43,81%) kemudian di kabupaten lain sebesar Rp 3,35 milyar (31,59 %), di kecamatan setempat dimana BPR tersebut berada sebesar Rp 2,42 milyar (22,88%) dan terkecil di Kota Surabaya sebesar Rp 0,19 milyar (1,80%). Walaupun penyaluran kredit di kecamatan lain di kabupaten Sidoarjo menduduki jumlah terbesar, namun jumlah penyaluran di kecamatan setempat dengan BPR masih lebih kecil dibandingkan dengan penyaluran kredit di kabupaten lain di luar kabupaten Sidoarjo.

Dari segi kepentingan daerah, BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah secara total mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah dengan penyaluran kredit sebesar 66,69 %, namun belum mampu memberikan dukungan secara maksimal terhadap peningkatan perekonomian di daerah sekitar lokasi BPR. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya penyaluran kredit di kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo adalah belum meratanya jumlah BPR, dimana dari sepuluh kecamatan yang potensi ekonominya tergolong rendah, masih terdapat lima kecamatan yang sampai saat ini belum terdapat kantor BPR.

5.6. Pengukuran Keberhasilan BPR Berdasarkan Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan

Selanjutnya sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III, untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja BPR terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, namun demikian mengingat fungsi utama BPR adalah sebagai lembaga intermediasi maka BPR akan dapat dikatakan berhasil apabila mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dan mempunyai kinerja keuangan yang sehat. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi tercermin pada kemampuannya dalam menghimpun dana dan kemudian menggunakan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan dalam menyalurkan kreditnya serta kemampuan mencapai kinerja keuangan yang sehat sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan.

Adapun indikator yang digunakan dalam menilai posisi kinerja masing-masing BPR dimaksud adalah jumlah dana, jumlah kredit, kemampuan menjalankan fungsi

intermediasi yang tercermin dalam perhitungan T hitung, serta penilaian faktor CAMEL seperti pada Tabel 5.13.

Tabel. 5.13

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit serta Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Dengan Kinerja Sehat di Kabupaten Sidoarjo.

Nama BPR	DPK *)	Kredit	T (hitung)	Capital	Asset Quality	Mana- jemen	Earning	liquidity
BPR A1	470,80	1.176,50	- 2,780	45,34	1,71	17,60	9,40	17,17
BPR A2	2.109,32	2.402,36	6,689	29,33	3,73	14,40	12,30	25,30
BPR A3	1.372,65	1.700,14	4,605	50,38	2,79	15,80	4,01	27,74
BPR A4	6.596,00	6.275,65	6,624	33,82	0,82	14,40	0,34	30,33
BPR A5	3.838,18	5.013,61	5,553	61,47	2,64	15,60	1,92	6,26
BPR B1	1.675,53	2.953,21	0,938	29,23	0,75	18,40	7,00	26,67
BPR B2	3.336,19	4.803,66	6,983	36,26	7,13	16,40	2,28	4,59
BPR B3	3.815,95	9.148,20	1,170	26,47	0,01	18,40	8,55	17,35
BPR B4	645,14	1.576,10	5,167	58,87	0,77	18,00	20,21	19,60
BPR B5	3.251,43	4.662,10	0,355	52,33	1,61	18,40	6,86	18,72
BPR C1	460,89	867,45	- 0,906	17,71	4,60	14,80	7,02	24,71
BPR C2	626,08	760,13	3,737	33,64	5,50	13,20	2,21	34,27
BPR C3	2.289,70	3.752,72	7,643	14,23	4,53	17,60	4,82	4,80
BPR C4	1.128,80	2.295,53	0,240	32,60	2,01	17,20	13,98	9,28
BPR C5	3.034,95	2.913,52	5,329	19,11	3,89	16,20	9,26	21,52

Keterangan : DPK = Dana Pihak Ketiga

Sumber : Bank Indonesia, data diolah

Dari Tabel 5.13, penilaian dilakukan dengan memberikan nilai skor berdasarkan rangking secara berurut dari jumlah yang terbesar sampai dengan jumlah yang terkecil, kemudian setelah semua indikator tersebut diberikan nilai skor lalu dijumlahkan dan akan

diperoleh nilai total dari masing-masing BPR. Langkah selanjutnya menghitung nilai rata-rata total skor dan kemudian menetapkan BPR mana yang total nilai skornya berada di atas nilai skor rata-rata dan BPR yang total nilai skor berada di bawah nilai skor rata-rata. Penghimpunan dana terbesar diraih oleh BPR A4 diberi nilai skor tertinggi yaitu 15 (lima belas), dan penghimpunan dana terkecil berada pada BPR C1 diberi nilai skor terkecil yaitu 1 (satu), demikian selanjutnya secara berturut-turut masing-masing BPR diberi skor sesuai dengan besar kecilnya perolehan penghimpunan dana.

Pada indikator kedua yaitu penyaluran kredit terbesar yaitu pada BPR B3 diberi nilai skor 15 (lima belas) dan penyaluran kredit terkecil pada BPR C2 diberi nilai skor 1 (satu). Hal yang sama dilakukan pula pada indikator T hitung, Capital, Manajemen, Earning dan Liquidity, yaitu angka yang memiliki arah penilaian positif, artinya semakin besar angka penilaian nilai skor yang diberikan semakin tinggi. Sementara itu khusus untuk indikator Asset Quality, memiliki arah penilaian yang sebaliknya, artinya semakin kecil nilai prosentase diberikan nilai skor yang semakin tinggi, begitu pula sebaliknya apabila nilai prosentase semakin besar maka diberikan nilai skor yang semakin rendah. Pada indikator nilai manajemen terdapat beberapa BPR yang mempunyai nilai sama besar, oleh karenanya pemberian nilai skornya juga diberikan nilai yang sama, sehingga nilai skor tertinggi tidak mencapai nilai 15 (lima belas) namun hanya mencapai nilai 11 (sebelas).

Langkah selanjutnya setelah masing-masing indikator diberikan nilai skor maka dibuat tabel nilai skor untuk masing-masing BPR. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14

Hasil Rangkings Tabel Dua Jalan Pengukuran Keberhasilan BPR
Berdasarkan Fungsi Intermediasi dan Faktor CAMEL Terhadap 15 (Lima Belas) BPR
di Kabupaten Sidoarjo

Nama BPR	DPK *)	Kredit	T (hitung)	Capital	Asset Quality	Manajemen	Earning	Liquidity
BPR A1	2	3	1	11	10	9	12	5
BPR A2	8	7	13	6	6	2	13	11
BPR A3	6	5	8	12	7	5	5	13
BPR A4	15	14	12	9	12	2	1	14
BPR A5	14	13	11	15	8	4	2	3
BPR B1	7	9	5	5	14	11	8	12
BPR B2	12	12	14	10	1	7	4	1
BPR B3	13	15	6	4	15	11	10	6
BPR B4	4	4	9	14	13	10	15	8
BPR B5	11	11	4	13	11	11	7	7
BPR C1	1	2	2	2	3	3	9	10
BPR C2	3	1	7	8	2	1	3	15
BPR C3	9	10	15	1	4	9	6	2
BPR C4	5	6	3	7	9	8	14	4
BPR C5	10	8	10	3	5	6	11	9

Sumber : Tabel 5.13, diolah kembali

Tabel 5.14 menunjukkan ranking masing-masing indikator yang ditabulasikan pada baris dan kolom yang tersedia, kemudian dijumlahkan sampai diperoleh total skor masing-masing kolom. Selanjutnya total skor dari masing-masing kolom dijumlahkan dan dibagi dengan n jumlah BPR yang diteliti dan diperoleh rata-rata total skor yaitu :
 $(53 + 66 + 61 + 79 + 70 + 71 + 61 + 80 + 77 + 75 + 32 + 40 + 56 + 56 + 62) / 15 = 62,6$.
 Rata-rata skor dimaksud berguna sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja masing-masing BPR, sehingga dapat diketahui apakah masing-masing BPR mendapatkan penilaian kinerja di atas rata-rata total skor atau justru masih berada di bawah rata-rata total skor.

Langkah berikutnya berdasarkan total skor yang berbeda-beda pada masing-masing BPR yang diteliti, dapat disusun suatu daftar total skor sehingga terlihat urutan kinerja BPR yang diteliti sesuai urutan ranking satu terbaik, dua terbaik, tiga terbaik dan seterusnya sampai dengan kinerja BPR yang terendah. Dalam penelitian ini sorting dan ranking data menggunakan tabel dua jalan (Tabel 5.13 dan 5.14), sehingga menghasilkan susunan BPR sesuai dengan urutan total skornya sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.15.

Tabel 5.15

Ranking Penilaian Kinerja 15 (lima belas) BPR yang Berada Di Kecamatan Dengan Potensi Ekonomi Tinggi, Sedang dan Rendah Di Kabupaten Sidoarjo.

No.	Nama BPR	Lokasi Kecamatan	Total Skor	Ranking
1.	BPR B3	Tarik	80	1
2.	BPR A4	Waru	79	2
3.	BPR B4	Krian	77	3
4.	BPR B5	Krian	75	4
5.	BPR B1	Krian	71	5
6.	BPR A5	Waru	70	6
7.	BPR A2	Taman	66	7
8.	BPR C5	Tulangan	62	8
9.	BPR A3	Gedangan	61	9
10.	BPR B2	Sidoarjo	61	9
11.	BPR C3	Porong	56	10
12.	BPR C4	Porong	56	10
13.	BPR A1	Taman	53	11
14.	BPR C2	Candi	40	12
15.	BPR C1	Candi	32	13

Sumber : Tabel 5.14 (diolah kembali)

Dari total skor masing-masing BPR tersebut di atas kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan rata-rata nilai skor sebesar 62,6. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 7 (tujuh) BPR yang diteliti memiliki skor di atas rata-rata total skor,

masing-masing adalah BPR B3 dengan total skor 80, BPR A4 dengan total skor 79, BPR B4 dengan total skor 77, BPR B5 dengan total skor 75, BPR B1 dengan total skor 71, BPR A5 dengan total skor 70 dan BPR A2 yang memiliki total skor 66. Sementara itu delapan BPR lainnya yang diteliti memiliki total skor di bawah skor rata-rata yaitu 62,6 masing-masing adalah BPR A2, BPR C5, BPR A3, BPR B2, BPR C3, BPR C4, BPR A1, BPR C2 dan BPR C1. Hasil penilaian ini tentunya hanya berlaku dalam posisi penelitian yaitu pada bulan Juni 2002, apabila penilaian dilakukan berdasarkan posisi yang lain tentunya akan memberikan hasil yang berbeda.

Dari Tabel 5.15, tampak bahwa 7 (tujuh) BPR yang memiliki total skor di atas rata-rata didominasi oleh BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan tinggi, masing-masing 4 (empat) BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang (BPR B3, BPR B4, BPR B5 dan BPR B1) dan 3 (tiga) BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi (BPR A4, BPR A5 dan BPR A2). Sementara itu kelima BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi rendah total skornya berada di bawah nilai rata-rata. Dari gambaran tersebut dapat menjadi suatu masukan bagi Bank Indonesia Surabaya khususnya dalam menentukan kebijakan fungsi pembinaan terhadap operasional BPR di masa mendatang, misalnya dalam menentukan prioritas penyelenggaraan pelatihan bagi pengurus dan pegawai BPR dan menetapkan prioritas dalam memberikan izin perluasan jaringan kantor BPR berdasarkan penilaian tingkat kejenuhan lokasi serta mengarahkan kepada calon investor atau BPR lama yang akan membukan kantor BPR pada wilayah yang masih berpotensi bagi perkembangan usaha BPR.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Atas dasar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, analisis dan pembahasan seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

- 6.1.1 Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa diduga ada perbedaan rata-rata posisi penghimpunan dana pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah”, ditolak dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (Probabilitas = 0,4465). Hal ini disebabkan tidak adanya perbedaan secara ekstrim jumlah penghimpunan dana diantara 15 (lima belas) BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo.
- 6.1.2 Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa diduga ada perbedaan rata-rata posisi penyaluran kredit pada BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah”, ditolak dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (Probabilitas = 0,4465). Hal ini disebabkan tidak adanya perbedaan secara ekstrim jumlah penyaluran kredit diantara 15 (lima belas) BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah di Kabupaten Sidoarjo.

- 6.1.3 Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penghimpunan dana masyarakat terhadap penyaluran kredit, yang dilakukan oleh BPR dengan kinerja sehat yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, sedang dan rendah, terbukti dengan korelasi yang signifikan dengan probabilitas kesalahan di bawah satu persen (Probabilitas = 0,000222).
- 6.1.4 Keberadaan BPR di Kabupaten Sidoarjo telah mampu mendukung terhadap peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Sidoarjo, namun demikian belum mampu mendukung secara maksimal terhadap perekonomian di tingkat kecamatan dimana BPR berada. Hal ini tercermin dari jumlah penyaluran kredit yang diberikan di kecamatan setempat oleh lima belas BPR dengan kinerja sehat hanya sebesar Rp 9,06 milyar atau 18,00%, sedangkan total penyaluran kredit di wilayah kabupaten lain dan kota Surabaya berjumlah Rp 24,01 milyar atau 47,71% dari total seluruh kredit yang disalurkan oleh lima belas BPR sampel.
- 6.1.5 Dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan fungsi intermediasi, tidak selalu BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi akan lebih baik daripada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan rendah. Begitupun juga BPR yang memiliki kinerja lebih baik berdasarkan aspek CAMEL, tidak selalu lebih baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya daripada BPR yang memiliki kinerja CAMEL-nya lebih rendah.
- 6.1.6 Penilaian kinerja BPR berdasarkan jenjang posisi menunjukkan bahwa tidak selalu BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, akan

mendapatkan penilaian kinerja lebih baik daripada BPR yang berada di kecamatan dengan potensi ekonomi sedang dan rendah.

6.1.7 Penyebaran kantor BPR di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan saat penelitian belum merata, dimana terdapat beberapa wilayah kecamatan yang jumlah BPR-nya relatif banyak, sementara di wilayah lain terdapat beberapa wilayah kecamatan yang jumlah BPR-nya relatif sedikit, bahkan pada beberapa kecamatan sama sekali belum terdapat BPR sama sekali.

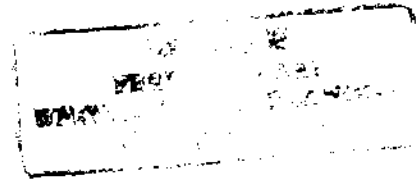
6.2. Saran – saran

Dari uraian sebagaimana dalam kesimpulan tersebut di atas, berikut ini adalah saran- saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini :

6.2.1 Untuk memaksimalkan dukungan BPR terhadap terlaksananya Otonomi Daerah di Kabupaten Sidoarjo, maka dibutuhkan upaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan himbauan baik kepada calon investor, atau pemilik BPR untuk memperluas atau membuka BPR baru di beberapa wilayah kecamatan yang saat ini belum terdapat kantor BPR.

6.2.2 Untuk dapat menarik minat bagi investor maupun pemilik BPR yang telah ada agar bersedia membuka kantor BPR baru di kecamatan yang saat ini belum terdapat kantor BPR, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dengan penyediaan atau perbaikan sarana dan fasilitas infrastruktur yang ada di wilayah kecamatan dimaksud.

- 6.2.3 Untuk lebih meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat pengusaha kecil dalam rangka pemberdayaan perekonomian di wilayah kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo secara umum, Pemerintah Daerah agar mendirikan BPR baru yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan pihak swasta seperti Koperasi Karyawan dari perusahaan/industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- 6.2.4 Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan BPR yang dilakukan oleh Bank Indonesia, agar memperhatikan faktor fungsi intermediasi sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja BPR, dan tidak hanya terbatas pada faktor CAMEL.
- 6.2.5 Dalam penyelenggaraan kursus/pelatihan terhadap SDM BPR agar lebih diprioritaskan kepada BPR-BPR yang berada di kecamatan-kecamatan dengan potensi ekonomi rendah.
- 6.2.6 Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai pula dengan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga regulator bagi lembaga perbankan, maka dalam penilaian kelayakan terhadap permohonan pemberian izin usaha baik BPR baru maupun pembukaan Kantor Cabang BPR atau kantor dibawahnya agar memperhatikan lokasi/wilayah yang memiliki potensi namun belum terdapat BPR atau jumlah BPR-nya masih relatif sedikit.



DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf, Yopic, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Intermedia, Jakarta, 1992.
- Johnson, Frank D, dan Richard D. Johnson, *Commercial Bank Management*, The Dryden Pres, New York. 1985.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia, Jakarta, 1999.
-Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Jakarta 1998.
-Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika 1999.
-Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sinar Grafika 1999.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
-, *Dasar - dasar Perkreditan*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 1999.
- Suharto, Pandu, *Seratus Tahun BPR di Indonesia 1895-1995*, Cetakan Pertama, PT. Ikrar Mandiri, 1996.
- Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2001, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo 2001.
- Stigum, Marcia L dan Rene O. Branch, Jr., *Managing Bank Assets and Liabilities*, Dow Jones-Irwin, Homewood Illinois, 1993.
- Nasution, Anwar, *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak paket Deregulasi Tahun 1988 Pada Sistem Keuangan Indonesia*, UI, Jakarta, 1991.
- Hempel, George H, Alan B. Coleman dan Donald G. Simonson, *Bank Management*, John Wiley & Son, New York, 1991.
- Budiono, *Ekonomi Moneter*, Edisi Ketiga, Cetakan Keenam, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1992.

- Mulyono, Teguh P, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta, Edisi Pertama, BPFE, 1987.
- Sutojo, Siswanto, *Analisa Kredit Bank Umum, Konsep dan Teknik*, Seri Umum No. 15 Cetakan Pertama, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.
- Sinungan, Muchdrasyah, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- McCoy, John B, Carry A. Frieder dan Robert B.Hedges, Jr., *Bottom Line Banking*, Probus Publishing Company, Chicago, Illionis, 1994.
- Rudiger, Dornbusch dan Fischer, Stanly, *Makro Ekonomi*, terjemahan, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986.
- Hunt, Pearson, Charles M. Williams dan Gordon Donaldson, *Basic Business Finance*, Fourth Edition, Richard D. Irwin Inc, Homewood Illionis, 1971.
- Simorangkir, *Pengantar Pemasaran Perbankan*, Edisi Kedua, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1992.
- Kotler, Philip, *Marketing Management; Analisis Planning Implementation and Control*, Seventh Edition, Prentice-Hall International Edition, USA, 1997.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, *Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta 1997.

HEADER DATA FOR: A:UNTUNG1 LABEL: PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA
 NUMBER OF CASES: 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

	X1	X2	X3
1	470799	1675534	460885
2	2109320	3336189	626080
3	1372653	3815952	2289700
4	6596005	645135	1128801
5	3838180	3251427	3034952

----- DESCRIPTIVE STATISTICS -----

HEADER DATA FOR: A:UNTUNG1 LABEL: PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA
 NUMBER OF CASES: 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

O.	NAME	N	MEAN	STD. DEV.	MINIMUM	MAXIMUM
1	X1	5	2877391.4000	2418525.3848	470799.0000	6596005.0000
2	X2	5	2544847.4000	1332834.9629	645135.0000	3815952.0000
3	X3	5	1508083.6000	1113627.1657	460885.0000	3034952.0000

----- ANALYSIS OF VARIANCE -----

HEADER DATA FOR: A:UNTUNG1 LABEL: PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA
 NUMBER OF CASES: 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

ONE-WAY ANOVA

GROUP	MEAN	N
1	2877391.400	5
2	2544847.400	5
3	1508083.600	5
GRAND MEAN	2310107.467	15

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
BETWEEN	5.1008E+12	2	2.5504E+12	.863	.4465
WITHIN	3.5464E+13	12	2.9553E+12		
TOTAL	4.0564E+13	14			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNG2 LABEL: PENYALURAN DANA
 NUMBER OF CASES: 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

	X1	X2	X3
1	1176496	2953214	867451
2	2402361	4803657	760129
3	1700138	9148198	3752722
4	6275648	1576095	2295527
5	5013612	4662104	2913524

----- DESCRIPTIVE STATISTICS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNG2 LABEL: PENYALURAN DANA
 NUMBER OF CASES: 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

NAME	N	MEAN	STD. DEV.	MINIMUM	MAXIMUM
X1	5	3313651.0000	2217239.2061	1176496.0000	6275648.0000
X2	5	4628653.6000	2854086.4809	1576095.0000	9148198.0000
X3	5	2117870.6000	1298496.8866	760129.0000	3752722.0000

----- ANALYSIS OF VARIANCE -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNG2 LABEL: PENYALURAN DANA
 NUMBER OF CASES: 5 NUMBER OF VARIABLES: 3

ONE-WAY ANOVA

GROUP	MEAN	N
1	3313651.000	5
2	4628653.600	5
3	2117870.600	5
GRAND MEAN	3353391.733	15

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
BETWEEN	1.5772E+13	2	7.8860E+12	1.604	.2413
WITHIN	5.8992E+13	12	4.9160E+12		
TOTAL	7.4764E+13	14			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGA1 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	322866	1496138
2	324575	1424561
3	327820	1427439
4	330178	1359739
5	346891	1448545
6	335035	1541615
7	323194	1454479
8	330157	1410991
9	326479	1342872
10	348845	1217500
11	340203	1207654
12	484238	1227736
13	463981	1176496

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGA1 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
1	X1	354189.3846	54042.7080
P. VAR.:	X2	1364289.6154	120532.6888

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	-1.4326	.5154	-2.780	.01792
CONSTANT	1871693.4525			

D. ERROR OF EST. = 96488.6062

r SQUARED = .4126
 r = -.6423

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	71926986353.2400	1	71926986353.2400	7.726	.0179
RESIDUAL	102410562435.8400	11	9310051130.5309		
TOTAL	174337548789.0800	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGA2 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	1646560	2150416
2	1620460	2163157
3	1709735	2227081
4	1846921	2328640
5	1909246	2392948
6	1938851	2444033
7	1947726	2365922
8	1955712	2418451
9	2011496	2388673
0	1963534	2381749
1	1910434	2356579
2	2067526	2370902
3	2109320	2402361

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGA2 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
	X1	1895193.9231	151801.7957
1. VAR.:	X2	2337762.4615	95618.0774

DEPENDENT VARIABLE: X2

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
.5643	.0844	6.689	.00003
CONSTANT	1268242.5736		

STANDARD ERROR OF EST. = 44362.5210

r SQUARED = .8027
 r = .8959

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	88065434708.4110	1	88065434708.4110	44.748	3.425E-05
RESIDUAL	21648366012.8190	11	1968033273.8926		
TOTAL	109713800721.2300	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGA3 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	474920	1012640
2	498707	1108600
3	450888	1486846
4	1019398	1759502
5	1110139	1795775
6	1122187	1745600
7	1081054	1700197
8	1105054	1646910
9	1180047	1609733
0	1269507	1634106
1	1450042	1766753
2	1479712	1744824
3	1372653	1704138

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGA3 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
.	X1	1047254.4615	356034.1884
1. VAR.:	X2	1593509.5385	251132.9713

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	.5724	.1243	4.605	.00076
CONSTANT	994099.7421			

1). ERROR OF EST. = 153295.2366

r SQUARED = .6584
 r = .8114

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	498319506032.1500	1	498319506032.1500	21.206	7.588E-04
RESIDUAL	258493725193.0800	11	23499429563.0070		
TOTAL	756813231225.2300	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGA4 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	4644894	5319930
2	5072522	5229950
3	5416702	5214790
4	5662606	5342577
5	5646189	5423399
6	6126715	5553876
7	5579550	5939474
8	6508610	6132585
9	6607305	6255380
10	6558172	6388287
11	6992495	6509889
12	6795790	6394365
13	6596005	6275648

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGA4 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
1	X1	6015965.7692	729035.4248
2	X2	5844626.9231	504200.4613

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
1	.6184	.0934	6.624	.00004
2	CONSTANT	2124253.1138		

D. ERROR OF EST. = 235768.2863

r SQUARED = .7996
 r = .8942

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	2439163729627.6000	1	2.43916E+12	43.880	3.739E-05
SIDUAL	611453533075.3000	11	55586684825.0270		
TOTAL	3050617262702.9000	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGA5 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	993097	1971406
2	1095324	2035431
3	1027784	2111105
4	1104785	2272843
5	1147945	2705121
6	1181569	2985476
7	1376089	3497350
8	1209300	3293682
9	1415602	3544036
0	1598382	3426168
.1	1908786	4115925
.2	3768250	4580085
.3	3838180	5013612

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGA5 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
1	X1	1666545.6154	981515.0991
2	X2	3196326.1538	978995.0067

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	.8563	.1542	5.553	.00017
CONSTANT	1769202.6122			

D. ERROR OF EST. = 524296.0546

r SQUARED = .7371
 r = .8585

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	8477424795851.5000	1	8.47742E+12	30.840	1.719E-04
SIDUAL	3023749881282.5000	11	274886352843.8600		
TOTAL	11501174677134.0000	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGA6 LABEL: KORELASI ANT PINGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	8082.30	11950.50
2	8611.60	11961.70
3	8932.90	12467.30
4	9963.90	13063.30
5	10160.40	13765.80
6	10704.40	14270.60
7	10307.60	14957.40
8	11108.80	14902.60
9	11540.90	15140.70
0	11738.40	15047.80
.1	12602.00	15956.80
.2	14595.50	16317.90
.3	14380.10	16572.30

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGA6 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	10979.1385	2012.4331
2	X2	14336.5154	1586.0446

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
CONSTANT	.7446	.0779	9.556	.00000
	6161.9797			

D. ERROR OF EST. = 543.1761

r SQUARED = .8925
 r = .9447

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	26941007.7426	1	26941007.7426	91.313	1.162E-06
RESIDUAL	3245442.5143	11	295040.2286		
TOTAL	30186450.2569	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB1 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	2048035	2778018
2	1760262	2676231
3	1667841	2665177
4	1624892	2654221
5	1386423	2585775
6	1476287	2757468
7	1547157	2461594
8	1476047	2749554
9	1612563	2824225
10	1588564	2719996
11	1656553	2925038
12	1601636	2869957
13	1675534	2953214

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB1 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	1624753.3846	161231.5821
P. VAR.:	X2	2740036.0000	136699.8294

DEPENDENT VARIABLE: X2

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
CONSTANT	.2307	.2460	.938	.36847
	2365211.5847			

STD. ERROR OF EST. = 137391.2949

r SQUARED = .0740
 r = .2721

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	16602073072.9100	1	16602073072.9100	.880	.3685
RESIDUAL	207640047065.0900	11	18876367915.0080		
TOTAL	224242120138.0000	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGB2 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	2375981	3766520
2	2516822	3783831
3	2242788	3970126
4	2296415	4076189
5	2812472	4378698
6	3123295	4706911
7	2918464	4568437
8	3020714	4444065
9	2732091	4370591
10	2869511	4533840
11	3169250	4450271
12	3304264	4876555
13	3336189	4803657

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ADER DATA FOR: A:UNTUNGB2 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 MBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	2824481.2308	373191.9809
P. VAR.:	X2	4363822.3846	363994.2127

 PENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	.8810	.1262	6.983	.00002
NSTANT	1875347.1585			

D. ERROR OF EST. = 163099.8863

r SQUARED = .8160
 r = .9033

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	1297284140889.7000	1	1.29728E+12	48.767	2.319E-05
RESIDUAL	292617301869.4000	11	26601572897.2180		
TOTAL	1589901442759.1000	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB3 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	3466008	6108759
2	3314693	6416790
3	3376851	6113170
4	3611576	6585573
5	3778098	6273424
6	3848691	6336980
7	4295205	6372187
8	4496931	6714330
9	4410587	6892002
10	4474722	7411174
11	4721768	7438669
12	4064403	7603755
13	3815952	9148198

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB3 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	3975037.3077	469486.8382
2	X2	6878077.7692	851230.1783

DEPENDENT VARIABLE: X2

REGRESSION	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
CONSTANT	.6030	.5156	1.170	.26690
	4481246.7798			

STD. ERROR OF EST. = 838475.6809

r SQUARED = .1106
 r = .3326

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	961657655685.5000	1	961657655685.5000	1.368	.2669
RESIDUAL	7733456142214.8000	11	703041467474.0700		
TOTAL	8695113797900.3000	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGB4 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	538324	1140932
2	497792	1141040
3	490251	1270707
4	582758	1298770
5	566705	1246451
6	587652	1277892
7	499528	1294723
8	673907	1361682
9	688865	1439263
0	669851	1434047
1	722221	1546472
2	886151	1605462
3	645135	1576095

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGB4 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	619164.6154	111903.7702
2	X2	1356425.8462	154076.7122

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	1.1587	.2243	5.167	.00031
CONSTANT	639015.4087			

D. ERROR OF EST. = 86935.0683

r SQUARED = .7082
 r = .8415

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	201740831897.8100	1	201740831897.8100	26.693	3.102E-04
SIDUAL	83134767139.8900	11	7557706103.6264		
TOTAL	284875599037.7000	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB5 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	2934400	3592106
2	2996971	3786836
3	2960967	4079725
4	2975457	4147596
5	2827677	4277308
6	2796900	4287614
7	2551293	4330398
8	2821113	4359679
9	2820342	4406444
10	2822276	4557788
11	2808974	4528393
12	3215382	4638436
13	3251427	4662104

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB5 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	2906398.3846	184115.9296
2	X2	4281109.7692	317847.0367

DEPENDENT VARIABLE: X2

REGRESSION	COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
CONSTANT	3746512.2941	.5175	.355	.72901

STD. ERROR OF EST. = 330090.6271

r SQUARED = .0114
 r = .1065

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	13762822090.2000	1	13762822090.2000	.126	.7290
RESIDUAL	1198558042988.2000	11	108959822089.8400		
TOTAL	1212320865078.4000	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB6 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	11362.70	17386.30
2	11086.50	17804.70
3	10738.70	18098.90
4	11091.10	18762.30
5	11371.40	18761.70
6	11832.80	19366.90
7	11811.60	19027.30
8	12488.70	19629.30
9	12264.40	19932.50
10	12424.90	20656.80
11	13078.80	20888.80
12	13071.80	21594.20
13	12724.20	23143.30

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNGB6 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	11949.8154	785.7992
P. VAR.:	X2	19619.4615	1622.2364

 PENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	1.7594	.3256	5.404	.00022
CONSTANT	-1405.6410			

STD. ERROR OF EST. = 886.3444

r SQUARED = .7264
 r = .8523

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	22938140.7060	1	22938140.7060	29.198	2.155E-04
RESIDUAL	8641670.5448	11	785606.4132		
TOTAL	31579811.2508	12			

ORDER DATA FOR: A:UNTUNG1 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	544062	643693
2	407178	631948
3	427965	648432
4	403245	686929
5	419268	716558
6	409835	740850
7	382961	739309
8	405562	796530
9	389126	754459
10	391731	787917
11	367144	769342
12	409738	832629
13	460885	867451

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ORDER DATA FOR: A:UNTUNG1 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 NUMBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	416823.0769	44512.1174
P. VAR.:	X2	739695.9231	73079.0739

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	-.4327	.4775	-.906	.38422
CONSTANT	920074.6186			

STD. ERROR OF EST. = 73629.3569

r SQUARED = .0695
 r = -.2636

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	4452508183.2130	1	4452508183.2130	.821	.3842
RESIDUAL	59634104239.7090	11	5421282203.6099		
TOTAL	64086612422.9220	12			

ADER DATA FOR: A:UNTUNGC2 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 MBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	412850	621489
2	449499	627998
3	474249	694930
4	523443	728036
5	508741	749674
6	542350	769434
7	544891	776294
8	550171	746387
9	504827	733436
10	510422	775843
11	509605	749584
12	508457	788163
13	626080	760137

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ADER DATA FOR: A:UNTUNGC2 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 MBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	512737.3077	51513.0846
P. VAR.:	X2	732415.7692	53602.5560

 PENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	.7782	.2083	3.737	.00328
NSTANT	333388.0086			

D. ERROR OF EST. = 37164.5314

r SQUARED = .5593
 r = .7479

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	19285581719.6220	1	19285581719.6220	13.963	3.285E-03
SIDUAL	15193226344.6860	11	1381202394.9715		
TOTAL	34478808064.2080	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGC3 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	1582769	2686299
2	1690856	2720989
3	1788826	2867524
4	1862761	2921522
5	1868415	2883585
6	1818251	2976203
7	1965106	3059520
8	1888247	3237884
9	1878054	3250031
10	1902620	3346536
11	2047775	3408384
12	2164059	3497848
13	2289700	3752722

----- REGRESSION ANALYSIS -----

ADER DATA FOR: A:UNTUNGC3 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 MBER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

DEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	1903649.1538	185725.2972
P. VAR.:	X2	3123772.8462	321309.9782

 PENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	1.5870	.2077	7.643	.00001
NSTANT	102614.6431			

SD. ERROR OF EST. = 133597.8373

r SQUARED = .8415
 r = .9173

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	1042549021797.7000	1	1.04255E+12	58.411	1.006E-05
RESIDUAL	196332203390.0000	11	17848382126.3640		
TOTAL	1238881225187.7000	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGC4 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	1090067	1908129
2	1108243	1970718
3	1176232	2033226
4	1114093	1987462
5	1068560	2023716
6	1119060	2109984
7	1103452	2114110
8	1089332	2139630
9	1086555	2148739
0	1015651	2050979
1	1005290	2071839
2	1085371	2258654
3	1128801	2295527

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGC4 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	X1	1091592.8462	44762.5121
2	X2	2085593.3077	109778.4687

DEPENDENT VARIABLE: X2

R.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	.1772	.7375	.240	.81452
CONSTANT	1892144.1747			

STD. ERROR OF EST. = 114360.1231

r SQUARED = .0052
 r = .0723

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	755131108.2000	1	755131108.2000	.038	.8145
RESIDUAL	143860615234.5600	11	13078237748.5960		
TOTAL	144615746342.7600	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGC5 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
1	1852021	1948249
2	1763278	1896778
3	2105000	2379157
4	2319221	2960026
5	2506785	2791773
6	2579245	2831696
7	2643305	2920751
8	2874050	2868168
9	2714790	2920263
0	2856057	2780507
1	2988447	2843652
2	3057037	2891776
3	3034952	2913524

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGC5 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
	X1	2561091.3846	435656.1420
1. VAR.:	X2	2688178.4615	369663.5138

DEPENDENT VARIABLE: X2

1.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
	.7204	.1352	5.329	.00024
INSTANT	843141.5913			

2). ERROR OF EST. = 204001.4112

r SQUARED = .7208
 r = .8490

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	1182031027479.3000	1	1.18203E+12	28.403	2.413E-04
RESIDUAL	457782333343.9000	11	41616575758.5360		
TOTAL	1639813360823.2000	12			

DER DATA FOR: A:UNTUNGC6 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

	X1	X2
.	5481.80	7807.90
2	5419.10	7848.40
3	5972.30	8623.30
4	6222.80	9284.00
5	6371.80	9165.30
6	6468.70	9428.20
7	6639.70	9610.00
8	6807.40	9788.60
9	6573.40	9806.90
0	6676.50	9741.80
1	6918.30	9842.80
2	7224.70	10269.10
3	7540.40	10589.40

----- REGRESSION ANALYSIS -----

DER DATA FOR: A:UNTUNGC6 LABEL: KORELASI ANT PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
 BER OF CASES: 13 NUMBER OF VARIABLES: 2

EX	NAME	MEAN	STD.DEV.
.	X1	6485.9154	612.9415
. VAR.:	X2	9369.6692	838.9710

 INDEPENDENT VARIABLE: X2

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 11)	PROB.
1.3431	.0795	16.900	.00000
CONSTANT	658.1721		

1. ERROR OF EST. = 168.7526

r SQUARED = .9629
 r = .9813

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	8133215.8365	1	8133215.8365	285.602	3.229E-09
RESIDUAL	313251.7512	11	28477.4319		
TOTAL	8446467.5877	12			